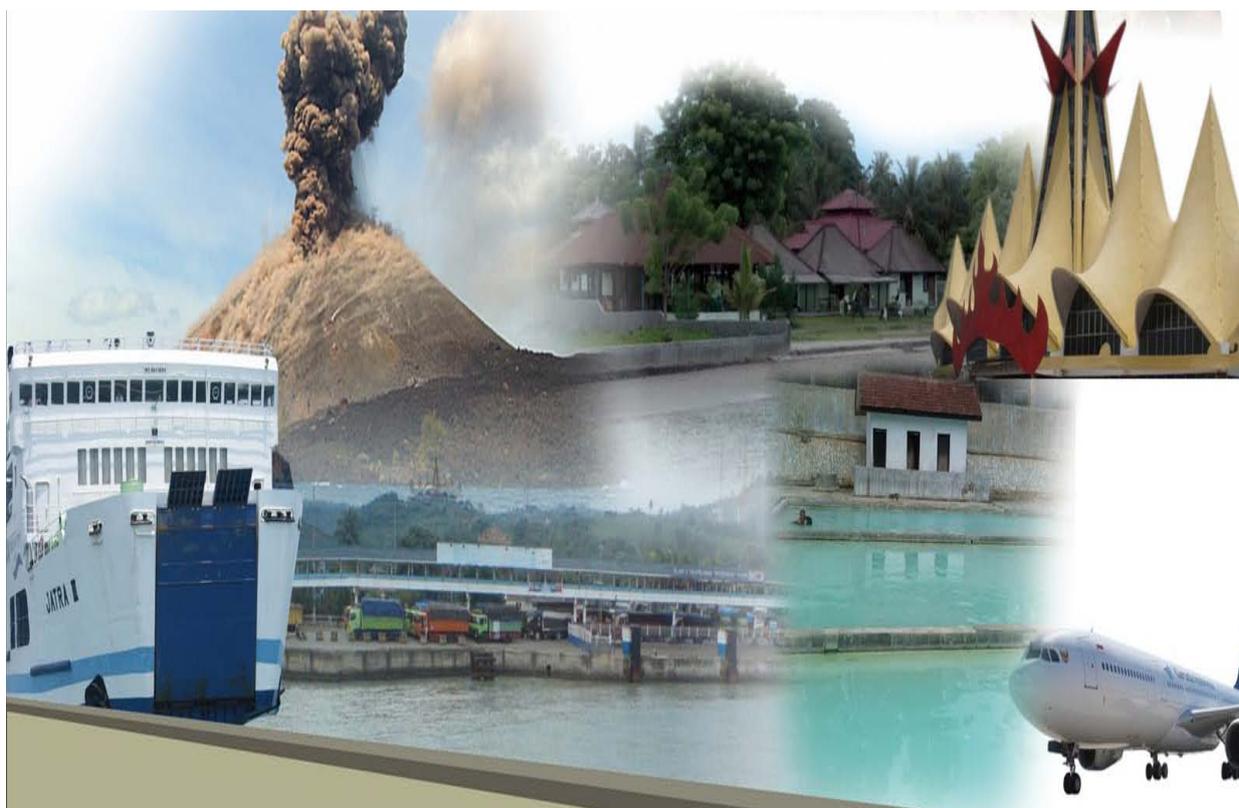




**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2018**



**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2019**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan bagian dari pertanggungjawaban amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyusun LKjIP sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak demi terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 : *“Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri, dan Berakhlak Mulia”*.

Pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan lima misi dengan tiga puluh lima sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2018 untuk mencapai empat puluh dua Indikator Kinerja Utama. Pada umumnya, pengukuran atas Capaian Kinerja Tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja tahun 2018 telah mencapai target capaian kinerja dari indikator sasaran dan indikator kinerja utama. Hal ini menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 dapat dikategorikan berhasil. Untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis, dibutuhkan dana sebesar Rp. 2.221.831.888.511,21 dengan realisasi sebesar Rp. 1.973.629.399.243,26 atau 88,83 %.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi pertimbangan pada penetapan program dan kegiatan dimasa yang akan datang yaitu meningkatkan kualitas opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi “Wajar Tanpa Pengecualian”, peningkatan dan pemantapan koordinasi antar lintas bidang dan instansi guna meningkatkan optimalisasi pencapaian sasaran.

Penetapan Kinerja tahun ini akan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasi.

Kalianda, Maret 2019


ERMANTO

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Lampung Selatan merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah kabupaten Lampung Selatan. Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, dan RSUD.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target tahun 2018 dan target akhir RPJMD dan pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 dengan realisasinya. Capaian tahun 2018 atau tahun sebelumnya tidak kami bandingkan dikarenakan tahun 2016 ini merupakan tahun awal/pertama RPJMD, sehingga indikator dan sarannya berbeda dengan tahun 2018. Tingkat capaian kinerja Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan sebagai berikut :

a. **Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Kondisi Akhir Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Persentase konstruksi Jalan Kabupaten dengan permukaan berpenutup aspal (hotmix)/beton semen pada Jaringan Jalan Kabupaten (persen) (PU dan PR)	76,3	100	89,41	117,18	131,06
2	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (persen) (PU dan PR)	55	100	47,98	87,24	181,82
3	Panjang Jalan Desa/Lingkungan dengan kondisi mantap (persen) (PU dan PR)	37,09	60	11,56	31,17	161,77
4	Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dengan kondisi mantap (persen) (PU dan PR)	85	100	65,96	77,60	117,65
5	Persentase desa yang terhubung dengan pusat kecamatan (Dishub)	46,67	100	41,17	88,21	214,27
6	Persentase Desa yang terhubung dengan Jaringan Telekomunikasi (persen) (Diskominfo)	80	100	80	100	125
7	Persentase desa yang teraliri listrik (Disperkim)	90	100	100	111,11	111,11
8	Persentase desa yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum (persen) (Disperkim)	82,76	100	83,4	100,77	120,83
9	Persentase kawasan kumuh, padat dan miskin di Kabupaten Lampung Selatan (persen) (Disperkim)	85	15	37,57	44,2	17,65
10	Persentase Desa dengan Akses Sanitasi yang Layak (Disperkim)	75	100	91,1	121,47	133,33

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Kondisi Akhir Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
11	Presentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti terkait pencemaran & pengrusakan lingkungan (persen) (DLH)	100	100	100	100	100
12	Angka rata rata lama sekolah (angka) (Disdik)	8,51	10	7,53	88,48	117,51
13	Angka Harapan Lama Sekolah (angka) (Disdik)	11,99	13	12,05	100,5	108,42
14	Usia harapan hidup (tahun) (Dinkes/BPS)	69,06	70	68,65	99,4	101,36
15	PDRB Per Kapita (dalam ribu) (Bappeda)	36.380	43.110	38.848	106,78	118,50
16	Tingkat pengangguran terbuka /TPT (persen)	5,5	3	5,38	97,82	54,54
17	Persentase laju pertumbuhan penduduk (persen) (Bappeda)	1.09	0.95	0,88	80,73	87,16
18	Jumlah Pemuda Pelopor (orang) (Dispora)	26	32	25	96.15	123.07
19	Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi (jenis) (Dispora)	20	28	18	90	140
20	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (persen) (Bappeda)	87.45	92	13,54	15,48	105,20
21	Indeks koefisien GINI (indeks)	0.23	0.2	0,24	104,35	86,96
22	Indeks desa membangun 2015=0,612)	0.64	0.68	0,63	98,44	106,25
23	Jumlah warung desa yang menghasilkan laba (DPMD)	84	260	104	123,81	309,52
24	Pertumbuhan ekonomi (persen)	6.3	6.6	5,23	83,02	104,76
25	PDRB ADHB (milyar rupiah)	33.000	36.000	28.567	86,57	109,10
26	Inflasi Kota Kalianda (angka)	4.4	4.4	2.39	54,32	100
27	Persentase PAD terhadap penerimaan daerah (persen)	10.55	12.75	10.41	98.67	120.85
28	Pola pangan harapan konsumsi (angka)	80.5	82	88.40	109.81	101.80
29	Pola pangan harapan ketersediaan (angka)	82	83.5	71.85	87.62	101.83
30	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (persen)	30.44	37	23.64	77,67	121,5

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Kondisi Akhir Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
31	Persentase peningkatan investasi PMDN (persen)	10	10	164.57	1645,7	100
32	Persentase peningkatan investasi PMA (persen)	5	5	1822.97	36459,40	100
33	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen)	1.58	1.76	1.52	96.2	111.39
34	Persentase sektor pertanian terhadap PDRB (persen)	30.85	30	29.84	96,73	97,24
35	Nilai tukar petani	100	100	105.56	105,56	100
36	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (persen)	100	100	100	100	100
37	Pelebagaan Pengerusutamaan Gender	89.25	90.72	88.83	99.53	101.65
38	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	100	100	100	100	100

b. Pengukuran Indikator Sasaran

Pengukuran tingkat capaian Indikator Sasaran disajikan per misi seperti sebagai berikut ini :

Misi 1. Membangun Infrastruktur Untuk Mempercepat Kemajuan Desa

Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah

Sasaran 1. Meningkatkan Jalan, Jembatan dan Irigasi.

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Persentase konstruksi Jalan Kabupaten dengan permukaan berpenutup aspal (hotmix)/beton semen pada Jaringan Jalan Kabupaten (persen) (PU dan PR)	76,3	100	89,41	117,18	131,06
2	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (persen) (PU dan PR)	55	100	47,98	87,24	181,82
3	Panjang Jalan Desa/Lingkungan dengan kondisi mantap (persen) (PU dan PR)	37,09	60	11,56	31,17	161,77

4	Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dengan kondisi mantap (persen) (PU dan PR)	85	100	65,96	77,60	117,65
---	--	----	-----	-------	-------	--------

Sasaran 2. Meningkatnya aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Persentase desa yang terhubung dengan pusat kecamatan (Dishub)	46,67	100	41,17	88,21	214,27
2	Persentase Desa yang terhubung dengan Jaringan Telekomunikasi (persen) (Diskominfo)	80	100	80	100	125
3	Persentase desa yang teraliri listrik (Disperkim)	90	100	100	111,11	111,11

Sasaran 3. Kondisi lingkungan pemukiman yang layak dan sehat

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Persentase desa yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum (persen) (Disperkim)	82,76	100	83,4	100,77	120,83
2	Persentase kawasan kumuh, padat dan miskin di Kabupaten Lampung Selatan (persen) (Disperkim)	85	15	37,57	44,2	17,65
3	Persentase Desa dengan Akses Sanitasi yang Layak (Disperkim)	75	100	91,1	121,47	133,33
4	Presentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti terkait pencemaran & pengrusakan lingkungan (persen) (DLH)	100	100	100	100	100

Misi 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik, terjangkau dan proaktif.

Sasaran 1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Angka rata rata lama sekolah (angka) (Disdik)	8,51	10	7,53	88,48	117,51
2	Angka Harapan Lama Sekolah (angka) (Disdik)	11,99	13	12,05	100,5	108,42

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas Derajat kesehatan masyarakat

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Usia harapan hidup (tahun) (Dinkes/BPS)	69,06	70	68,65	99,4	101,36

Sasaran 3. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	PDRB Per Kapita (dalam ribu) (Bappeda)	36.380	43.110	38.848	106,78	118,50

Sasaran 4. Menurunnya Pengangguran

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Tingkat pengangguran terbuka /TPT (persen)	5,5	3	5,38	97,82	54,54

Sasaran 5. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (persen) (Bappeda)	1.09	0.95	0,88	80,73	87,16

Sasaran 6. Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Jumlah Pemuda Pelopor (orang) (Dispora)	26	32	25	96.15	123.07

Sasaran 7. Meningkatnya Prestasi Olahraga

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi (jenis) (Dispota)	20	28	18	90	140

Misi 3. Membangun perekonomian daerah dengan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan perdesaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sasaran 1. Menurunnya angka kemiskinan

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (persen) (Bappeda)	87,45	92	13,54	15,48	105,20
2	Indeks koefisien GINI (indeks)	0,23	0,2	0,24	104,35	86,96

Sasaran 2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Indeks desa membangun 2015=0,612)	0,64	0,68	0,63	98,44	106,25
2	Jumlah warung desa yang menghasilkan laba (DPMD)	84	260	104	123,81	309,52

Sasaran 3. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Pertumbuhan ekonomi (persen)	6,3	6,6	5,23	83,02	104,76
2	PDRB ADHB (milyar rupiah)	33.000	36.000	28.567	86,57	109,10
3	Inflasi Kota Kalianda (angka)	4,4	4,4	2,39	54,32	100
4	Persentase PAD terhadap penerimaan daerah (persen)	10,55	12,75	10,41	98,67	120,85

Sasaran 4. Terpenuhiya kebutuhan konsumsi pangan perkapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Pola pangan harapan konsumsi (angka)	80.5	82	88.40	109.81	101.80
2	Pola pangan harapan ketrediaan (angka)	82	83.5	71.85	87.62	101.83

Sasaran 5. Meningkatnya peran sektor industri terhadap PDRB

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (persen)	30.44	37	23.64	77,67	121,5

Sasaran 6. Peningkatan kontribusi investasi/ penanaman modal dalam perekonomian daerah

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Persentase peningkatan investasi PMDN (persen)	10	10	164.57	1645,7	100
2	Persentase peningkatan investasi PMA (persen)	5	5	1822.97	36459,40	100

Sasaran 7. Meningkatnya peran pariwisata daerah

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen)	1.58	1.76	1.52	96.2	111.39

Sasaran 8. Stabilitas pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
----	-------------------	-------------	--------------	----------------	----------------	-----------------

1	Persentase sektor pertanian terhadap PDRB (persen)	30.85	30	29.84	96,73	97,24
2	Nilai tukar petani	100	100	105.56	105,56	100

Misi 4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, menjunjung tinggi hukum, demokratis dan memberdayakan perempuan berlandaskan nilai agama dan budaya

Sasaran 1. Terwujudnya kondisi sosial masyarakat yang baik berdasarkan nilai agama dan budaya

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (persen)	100	100	100	100	100

Sasaran 2. Meningkatnya Kesetaraan Gender

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.25	90.72	88,83	99,53	101,65
2	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	100	100	100	100	100

Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Professional.

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Indeks Reformasi Birokrasi	75	90	69,26	92,34	120

**Sasaran 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keunagan
Instansi Pemerintah (AKIP)**

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Nilai Sakip	B	A	CC	79,67	130,77
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	75

Sasaran 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Target RPJMD	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian RPJMD
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	6,4	7	8,9	139,06	109,37

c. Pengukuran Dukungan terhadap Program Prioritas Nasional

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator dalam sasaran-sasaran strategis dalam masing-masing misi dapat mendukung pengukuran pencapaian prioritas program nasional Tahun 2017 sebagai berikut:

No	Program Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Program Penyelenggaraan Jalan (PU)	379.571.053.481,00	235.336.206.367,00	62,00
2	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat (Dishub)	834.732.500,00	770.730.690,00	92,33
3	Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (Sekda), (PU), (Bappeda)	199.000.000,00	191.168.000,00	96,06
		453.250.000,00	398.380.000,00	87,89
		30.000.000,00	29.917.000,00	99,72
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (Sekda), (PU), (Disperkim)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
		32.908.035.320,00	26.185.458.340,00	79,57
		20.344.061.270,00	18.770.176.627,00	92,26
5	Program Penataan Ruang Wilayah (PU)	1.897.728.000,00	1.296.546.250,00	68,32

No	Program Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (DLH)	971.707.000,00	958.948.418,00	98,69
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (DLH)	60.000.000,00	59.512.290,00	99,19
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (DLH)	197.520.000,00	194.806.712,00	98,63
9	Program Pengembangan & Pengelolaan Sumber Daya Air (PU PR)	13.036.059.950,00	12.153.149.528,00	93,23
10	Program Pendidikan Dasar (Disdik)	140.919.799.732,00	138.021.570.977,00	97,94
11	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Disdik)	587.612.900,00	584.703.800,00	99,50
12	Program Fasilitasi Pendidikan (Disdik)	2.484.667.900,00	2.120.781.900,00	85,35
13	Program Pengembangan Perpustakaan Daerah (Perpus)	290.500.000,00	290.500.000,00	100,00
14	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Dinkes)	3.365.737.000,00	2.985.650.927,00	88,71
15	Program Pengembangan Layanan RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM (RSUD)	6.477.236.750,00	5.276.913.650,00	81,47
16	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Dinkes), (Sekda)	5.342.274.487,00 366.260.000,00	5.329.355.883,00 316.667.510,00	99,76 86,46
17	Program Pembinaan Upaya Kesehatan (Dinkes)	25.187.484.936,00	24.941.004.075,00	99,02
18	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Dinkes)	71.352.324.023,00	63.113.517.213,00	88,45
19	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dinkes)	5.773.642.515,00	5.624.593.826,00	97,42
20	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinkes)	331.980.000,00	331.980.000,00	100,00
21	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Kesehatan (Dinkes)	6.323.633.200,00	6.059.929.800,00	95,83
22	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinsos)	1.382.522.000,00	1.279.066.530,00	92,52
23	Program Pemberdayaan Sosial (Dinsos)	86.701.000,00	83.682.250,00	96,52
24	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Disnaker)	439.352.476,00	385.169.449,64	87,67

No	Program Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase
25	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Disnaker)	95.140.000,00	90.763.000,00	95,40
26	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (Disnaker)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
27	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (PP & KB)	7.001.803.500,00	5.105.467.200,00	72,95
28	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	3.073.531.600,00	2.931.696.365,00	95,39
29	Program Perlindungan Anak (Sekda), (PP & PA)	30.000.000,00 34.500.000,00	30.000.000,00 34.499.400,00	100,00 100,00
30	Program Rehabilitasi Sosial (Dinsos)	313.127.000,00	252.284.900,00	80,57
31	Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemuda (Dispora)	245.713.000,00	245.713.000,00	100,00
32	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga (Dispora)	888.390.000,00	819.552,500,00	92,25
33	Program Bina Pembangunan Desa (DPMD)	1.433.725.600,00	1.432.754.369,00	99,93
34	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi (Disdag)	196.473.350,00	156.533.850,00	79,67
35	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi (Dinas Koperasi)	59.750.000,00	59.475.000,00	99,54
36	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Sekda) (DKP)	285.000.000,00 739.690.000,00	259.806.000,00 728.414.100,00	91,16 94,48
37	Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri (Disdag)	120.000.000,00	119.499.200,00	99,58
38	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (Disdag)	2.338.039.000,00	2.312.854.459,00	98,92
39	Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Disdag)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
40	Program Pengembangan perdagangan (Disdag)	392.471.950,00	391.182.950,00	99,67
41	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen (Disdag)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
42	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (DPMPTSP)	190.000.000,00	187.000.000,00	98,42
43	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan (DPMPTSP)	545.000.000,00 105.000.000,00	535.127.497,00 104.925.000,00	98,19 99,93
44	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Disperbud)	3.754.927.350,00	3.509.636.402,00	93,47
45	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (Sekda), (Disdag)	365.000.000,00 1.051.362.500,00	362.230.000,00 1.012.594.000,00	99,24 95,72

No	Program Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase
46	Program Pemasaran Pariwisata (Disparbud)	272.380.000,00	271.970.000,00	99,85
47	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparbud)	127.000.000,00	127.000.000,00	100,00
48	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan (TPH Bund)	145.000.000,00	119.289.100,00	82,27
49	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura (TPH Bund)	64.921.000,00	64.572.000,00	99,46
50	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan (TPH Bund)	279.060.200,00	274.591.200,00	98,40
51	Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat (Disnak Keswan)	769.805.000,00	757.267.500,00	97,75
52	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan (TPH Bund), (Disnak)	5.927.401.138,00 1.584.738.500,00	5.842.028.725,00 1.549.076.500,00	98,56 98,3
53	Program penerapan teknologi dan inovasi pertanian berkelanjutan (TPH Bund), (Disnak Keswan)	100.000.000,00 190.475.000,00	99.320.000,00 189.162.500,00	99,32 99,31
54	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian (TPH Bund), (Disnak Keswan)	149.925.400,00 23.543.000,00	149.103.900,00 23.543.000,00	99,45 100,00
55	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian (TPH Bund), (DKP), (Disnak Keswan)	185.909.800,00 61.000.000,00 276.742.000,00	178.773.550,00 50.000.000,00 275.806.061,00	96,16 81,97 99,66
56	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Perikanan (Perikanan)	175.000.000,00	174.868.750,00	99,93
57	Program Pengelolaan TPI dan Pemberdayaan Nelayan (Perikanan)	1.200.534.200,00	1.022.336.050,00	85,16
58	Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya (Perikanan)	1.123.415.450,00	1.098.996.177,00	97,83
59	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sekda), (Pol Pp)	62.793.200,00 3.907.218.500,00	60.687.450,00 3.907.019.400,00	96,65 99,99
60	Program Penanggulangan Bencana Daerah	247.750.000	247.739.000	100,00
61	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	241.000.000,00	241.000.000,00	100,00
62	Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat (Sekda)	7.056.200.000,00	5.090.956.500,00	72,15
63	Program Pelestarian Budaya (Disparbud)	2.125.975.000,00	2.109.514.500,00	99,23
64	Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	10.936.350.000,00	10.626.541.939,00	97,17

No	Program Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase
65	Program peningkatan wawasan kebangsaan (Sekda)	164.327.000,00	160.867.000,00	97,89
66	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Sekda)	31.413.000,00	14.853.000,00	47,28
67	Program Penguatan KORPS Pegawai Republik Indonesia	287.000.000,00	286.999.000,00	100,00
68	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Sekda), (DPRD), (Dispora)	608.560.000,00 670.000.000,00 233.835.000,00	596.750.000,00 665.625.000,00 143.085.000,00	98,06 99,32 61,19
69	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah (BKD)	2.224.711.500,00	1.983.130.908,00	89,14
70	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Sekda), (BPKAD), (PU), (Disdag), (PP & RD), (Perpus), (Capil), (DPRD)	52.500.000,00 35.000.000,00 270.000.000,00 9.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 585.000.000,00	52.500.000,00 14.400.000,00 270.000.000,00 4.245.000,00 5.400.000,00 20.000.000,00 6.950.000,00 584.210.941,00	100,00 41,14 100,00 47,17 18,00 100,00 69,50 99,87
71	Program Pemerintahan Desa (Sekda), (DPMD)	337.500.000,00 436.967.500,00	297.129.550,00 436.590.150,00	88,04 99,91
72	Program Penataan Produk Hukum Daerah (Sekda), (DPRD), (POL PP)	961.854.221,00 982.402.000,00 534.544.000,00	961.854.221,00 961.854.221,00 532.134.000,00	100,00 97,91 99,55
73	Program Penegakan Perda (Pol Pp)	171.000.000,00	171.000.000,00	100,00
74	Program Peningkatan Kualitas Personil Sat Pol PP	36,000,000	36,000,000	100,00
75	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Litbang), (Bappeda)	76.000.000,00 2.051.749.000,00	73.803.900,00 1.954.836.094,00	97,11 95,28
76	Program Penelitian, pengembangan dan inovasi daerah (Litbang)	223.000.000,00	221.668.750,00	99,40
77	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Bappeda)	435.000.000,00	428.104.934,00	98,41
78	Program Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan (TPH Bund)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
79	Program Pengelolaan Administrasi Tanah, Izin Lokasi, serta Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah (Disperkim)	294.949.000,00	292.304.680,00	99,10
80	Program Pengembangan Data, Informasi Statistik, dan Persandian Daerah (TPH Bund), (DKP), (Disdik), (Disnaker), (Diskoper), (PU), (Bappeda)	46.130.000,00 57.540.000,00 24.421.000,00 29.900.000,00 27.587.200,00 180.000.000,00 198.000.000,00	39.679.911,00 57.502.500,00 24.421.000,00 26.288.600,00 27.587.200,00 178.099.000,00 197.852.000,00	86,02 99,93 100,00 87,92 100,00 98,94 99,93

No	Program Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase
81	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekda), (Bappeda), (BPKAD), (PP RD)	148.442.750,00	148.425.450,00	99,99
		3.041.220.950,00	2.704.508.600,00	88,93
		3.107.637.600,00	2.873.979.332,00	92,48
		3.041.220.950,00	2.704.508.600,00	88,93
82	Program Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD)	618.250.000,00	586.826.000,00	94,92
83	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Sekda)	766.386.200,00	752.222.200,00	98,15
84	Program Penataan Administrasi Wilayah (Sekda)	204.972.800,00	180.930.250,00	88,27
85	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD (Sekda), (DPRD)	6.433.734.100,00	4.880.931.002,00	75,86
		228.000.000,00	226.380.000,00	99,29
86	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Sekda)	16.410.411.625,00	15.441.446.052,00	94,10
87	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan (Sekda)	806.360.150,00	664.299.349,00	82,38

2. Analisis Capaian Kinerja

Dengan pengukuran kinerja yang absolut dan tidak terfokus pada satu atribut, maka pengukuran ini dianggap akan lebih terbebas dari distorsi aritmatik pembobotan. Asumsi ini mendasari asumsi berikutnya bahwa capaian kinerja dapat melebihi 100%. Dengan kebebasan yang tinggi maka pengukuran ini menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja ke dalam empat kategori, sebagai berikut:

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat baik
II	81% sampai 100%	Baik
III	60% sampai 80%	Cukup
IV	Kurang dari 60%	Kurang

Dari penilaian sendiri (*self assessment*) berdasarkan metode/cara/langkah kerja tersebut di atas, ternyata tidak semua indikator sasaran berhasil dicapai dengan sempurna.

a. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah direalisasikan dengan sangat baik, dengan prosentase rata-rata realisasi pencapaian target mencapai 578,11%. Sementara itu, prosentase rata-rata realisasi pencapaian target akhir RPJMD mencapai 111,70%.

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mampu memenuhi target IKU tahun 2018, namun ada beberapa Indikator Kinerja utama yang harus mendapatkan perhatian karena pencapaian targetnya masih belum baik, yaitu Menurunnya angka kemiskinan dan Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas .

b. Analisis Capaian Indikator Sasaran

Capaian kinerja masing-masing indikator sasaran untuk tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Misi 1. Membangun Infrastruktur Untuk Mempercepat Kemajuan Desa Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah.

Dari hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator dalam sasaran-sasaran strategis menunjukkan bahwa misi 1 telah dilaksanakan dengan baik, dengan prosentase rata-rata realisasi pencapaian target mencapai 89,89 %.

Adapun rincian analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Jalan, Jembatan dan Irigasi
------------	---

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata persentase realisasi pencapaian target dari empat indikator kinerja dalam rangka tersedianya layanan Jalan, Jembatan dan Irigasi, dan secara terpadu

mampu mengkoneksikan seluruh pelosok daerah telah mencapai 78,30% yang mencapai cukup.

1.2	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah
------------	--

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwarata-rata persentase realisasi pencapaian target dari tiga indikator kinerja dalam rangka mencapai meningkatnya aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah 99,77% yang mencapai nilai baik.

1.3	Sasaran Strategis 3 Kondisi Lingkungan Pemukiman Yang Layak Dan Sehat
------------	--

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase realisasi pencapaian target dari empat indikator kinerja dalam rangka mewujudkan Kondisi lingkungan pemukiman yang layak dan sehat 91,61% yang mencapai nilai Baik.

2) Misi 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik, terjangkau dan proaktif.

Dari hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator dalam sasaran-sasaran strategis menunjukkan bahwa misi 2 telah dilaksanakan dengan baik, dengan prosentase rata-rata realisasi pencapaian target mencapai 83,52%. Adapun rincian analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat
------------	--

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata realisasi pencapaian target dari dua indikator kinerja dalam rangka meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat telah 94,49% yang mencapai nilai baik.

2.2	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat
------------	---

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata realisasi pencapaian target dalam rangka meningkatnya kualitas Derajat kesehatan masyarakat telah 99,4% yang mencapai nilai baik.

2.3	Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
------------	---

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata realisasi pencapaian target dalam rangka meningkatnya pendapatan masyarakat telah tercapai 106,78% yang mencapai nilai sangat baik.

2.4	Sasaran Strategis 4 Menurunnya Pengangguran
------------	--

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata realisasi pencapaian target dalam rangka Menurunnya Pengangguran telah 97.82% yang mencapai nilai baik.

2.5	Sasaran Strategis 5 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
------------	---

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata realisasi pencapaian target dalam rangka menurunnya laju pertumbuhan penduduk telah 80,73% yang mencapai nilai cukup.

2.6	Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan
------------	--

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase realisasi pencapaian target dalam rangka meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan telah 96,15% yang mencapai nilai baik.

2.7	Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Prestasi Olahraga
------------	---

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata realisasi pencapaian target dalam rangka Meningkatkan Prestasi Olahraga telah 90% yang mencapai nilai baik.

3) Misi 3. Membangun perekonomian daerah dengan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan perdesaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dari hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator dalam sasaran-sasaran strategis menunjukkan bahwa misi 3 telah dilaksanakan dengan sangat baik, dengan prosentase rata-rata realisasi pencapaian target mencapai 2.456,66%. Adapun rincian analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1	Sasaran Strategis 1 Menurunkan angka kemiskinan
------------	--

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata realisasi pencapaian target dari dua indikator kinerja dalam rangka menurunkan angka kemiskinan telah 59,91% yang mencapai kurang.

3.2	Sasaran Strategis 2 Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas
------------	--

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata realisasi pencapaian target dari empat indikator kinerja dalam rangka tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas telah 55,98% yang mencapai nilai kurang.

3.3	Sasaran Strategis 3 Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan perkapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi
------------	--

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata realisasi pencapaian target dari dua indikator kinerja dalam rangka terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan perkapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi telah 98,71% yang mencapai nilai baik.

3.4	Sasaran Strategis 4 Meningkatnya peran sektor industri terhadap PDRB
------------	---

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata realisasi pencapaian target dari tiga indikator kinerja dalam rangka meningkatnya peran sektor industri terhadap PDRB telah 77,67% yang bernilai cukup.

3.5	Sasaran Strategis 5 Peningkatan Kontribusi Investasi/ Penanaman Modal Dalam Perekonomian Daerah
------------	--

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata realisasi pencapaian target dari dua indikator kinerja dalam rangka peningkatan kontribusi investasi/ penanaman modal dalam perekonomian daerah telah 19.052,55% yang mencapai nilai sangat baik.

3.6	Sasaran Strategis 6 Meningkatnya peran pariwisata daerah
------------	---

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase realisasi pencapaian target dalam rangka meningkatnya peran pariwisata daerah telah 96,2% yang mencapai nilai baik.

3.7	Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan
------------	--

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase realisasi pencapaian target dari dua Indikator kinerja dalam rangka meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan yaitu 11,12% yang mencapai nilai sangat baik.

3.8	Sasaran Strategis 8 Stabilitas Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB
------------	--

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata realisasi pencapaian target dari dua indikator kinerja dalam rangka stabilitas pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB telah 101,14% yang mencapai nilai sangat baik.

Misi 4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Damai, Menjunjung Tinggi Hukum, Demokratis Dan Memberdayakan Perempuan Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya.

Dari hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator dalam sasaran-sasaran strategis menunjukkan bahwa misi 4 telah dilaksanakan dengan baik, dengan prosentase rata-rata realisasi pencapaian target mencapai 99.88%. Adapun rincian analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kondisi sosial masyarakat yang baik berdasar nilai agama dan budaya
------------	--

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata realisasi pencapaian target dalam rangka terwujudnya kondisi sosial masyarakat yang baik berdasar nilai agama dan budaya telah 100% yang mencapai nilai baik.

4.2	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kiestaraan Gender
------------	---

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata realisasi pencapaian target dari dua indikator kinerja dalam rangka meningkatnya kiestaraan gender yaitu 99,76% yang mencapai nilai baik.

Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Professional.

Dari hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator dalam sasaran-sasaran strategis menunjukkan bahwa misi 5 telah dilaksanakan dengan sangat baik, dengan prosentase rata-rata realisasi pencapaian target mencapai 160,62%. Adapun rincian analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing- masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kwaitas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi
------------	---

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata realisasi pencapaian target dalam rangka meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi yaitu 92,34% yang mencapai nilai baik.

5.2	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keunagan Instansi Pemerintah (AKIP)
------------	---

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase rata-rata realisasi pencapaian target dari dua indikator kinerja dalam rangka meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP) telah 89,83% yang mencapai nilai baik.

5.3	Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
------------	---

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa persentase realisasi pencapaian target dalam rangka Meningkatnya kualitas pelayanan publik telah 139,06%, yang mencapai nilai sangat baik.

c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Analisis ini, kami mencoba untuk menganalisis pencapaian target indikator sasaran strategis tahun 2018 dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran program strategis per misi.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada tiap program strategis per misi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Misi 1. Membangun Infrastruktur Untuk Mempercepat Kemajuan Desa Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah.

No	Program Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Program Penyelenggaraan Jalan (PU)	379.571.053.481,00	235.336.206.367,00	62,00
2	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat (Dishub)	834.732.500,00	770.730.690,00	92,33
3	Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (Sekda), (PU), (Bappeda)	199.000.000,00	191.168.000,00	96,06
		453.250.000,00	398.380.000,00	87,89
		30.000.000,00	29.917.000,00	99,72
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (Sekda), (PU), (Disperkim)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
		32.908.035.320,00	26.185.458.340,00	79,57
		20.344.061.270,00	18.770.176.627,00	92,26

5	Program Penataan Ruang Wilayah (PU)	1.897.728.000,00	1.296.546.250,00	68,32
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (DLH)	971.707.000,00	958.948.418,00	98,69
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (DLH)	60.000.000,00	59.512.290,00	99,19
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (DLH)	197.520.000,00	194.806.712,00	98,63
9	Program Pengembangan & Pengelolaan Sumber Daya Air (PU PR)	13.036.059.950,00	12.153.149.528,00	93,23

Prosentase rata-rata realisasi anggaran program strategis mencapai 88,62% sedangkan pencapaian target indikator sasaran strategis mencapai 89,89%. Hal ini mengindikasikan telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya keuangan.

2). Misi 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik, terjangkau dan proaktif.

No	Program Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Program Pendidikan Dasar (Disdik)	140.919.799.732,00	138.021.570.977,00	97,94
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Disdik)	587.612.900,00	584.703.800,00	99,50
3	Program Fasilitasi Pendidikan (Disdik)	2.484.667.900,00	2.120.781.900,00	85,35
4	Program Pengembangan Perpustakaan Daerah (Perpus)	290.500.000,00	290.500.000,00	100,00
5	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Dinkes)	3.365.737.000,00	2.985.650.927,00	88,71
6	Program Pengembangan Layanan RSUD dr. H. BOB BAZAR,SKM (RSUD)	6.477.236.750,00	5.276.913.650,00	81,47
7	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Dinkes), (Sekda)	5.342.274.487,00 366.260.000,00	5.329.355.883,00 316.667.510,00	99,76 86,46
8	Program Pembinaan Upaya Kesehatan (Dinkes)	25.187.484.936,00	24.941.004.075,00	99,02
9	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Dinkes)	71.352.324.023,00	63.113.517.213,00	88,45

10	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dinkes)	5.773.642.515,00	5.624.593.826,00	97,42
11	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinkes)	331.980.000,00	331.980.000,00	100,00
12	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Kesehatan (Dinkes)	6.323.633.200,00	6.059.929.800,00	95,83
13	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinsos)	1.382.522.000,00	1.279.066.530,00	92,52
14	Program Pemberdayaan Sosial (Dinsos)	86.701.000,00	83.682.250,00	96,52
15	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Disnaker)	439.352.476,00	385.169.449,64	87,67
16	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Disnaker)	95.140.000,00	90.763.000,00	95,40
17	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (Disnaker)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
18	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (PP & KB)	7.001.803.500,00	5.105.467.200,00	72,95
19	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	3.073.531.600,00	2.931.696.365,00	95,39
20	Program Perlindungan Anak (Sekda), (PP & PA)	30.000.000,00 34.500.000,00	30.000.000,00 34.499.400,00	100,00 100,00
21	Program Rehabilitasi Sosial (Dinsos)	313.127.000,00	252.284.900,00	80,57
22	Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemuda (Dispora)	245.713.000,00	245.713.000,00	100,00
23	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga (Dispora)	888.390.000,00	819.552,500,00	92,25
24	Program Pendidikan Dasar (Disdik)	140.919.799.732,00	138.021.570.977,00	97,94

Prosentase rata-rata realisasi anggaran program strategis mencapai 93,50% sedangkan pencapaian target indikator sasaran strategis mencapai 83,53%. Hal ini mengindikasikan telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya keuangan.

3). Misi 3. Membangun perekonomian daerah dengan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan perdesaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

No	Program Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri (Disdag)	120.000.000,00	119.499.200,00	99,58
2	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (Disdag)	2.338.039.000,00	2.312.854.459,00	98,92
3	Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Disdag)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
4	Program Pengembangan perdagangan (Disdag)	392.471.950,00	391.182.950,00	99,67
5	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen (Disdag)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
6	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (DPMPTSP)	190.000.000,00	187.000.000,00	98,42
7	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan (DPMPTSP)	545.000.000,00 105.000.000,00	535.127.497,00 104.925.000,00	98,19 99,93
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Disparbud)	3.754.927.350,00	3.509.636.402,00	93,47
9	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (Sekda), (Disdag)	365.000.000,00 1.051.362.500,00	362.230.000,00 1.012.594.000,00	99,24 95,72
10	Program Pemasaran Pariwisata (Disparbud)	272.380.000,00	271.970.000,00	99,85
11	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparbud)	127.000.000,00	127.000.000,00	100,00
12	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan (TPH Bund)	145.000.000,00	119.289.100,00	82,27
13	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura (TPH Bund)	64.921.000,00	64.572.000,00	99,46
14	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan (TPH Bund)	279.060.200,00	274.591.200,00	98,40
15	Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat (Disnak Keswan)	769.805.000,00	757.267.500,00	97,75
16	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan (TPH Bund), (Disnak)	5.927.401.138,00 1.584.738.500,00	5.842.028.725,00 1.549.076.500,00	98,56 98,3
17	Program penerapan teknologi dan inovasi pertanian berkelanjutan (TPH Bund), (Disnak Keswan)	100.000.000,00 190.475.000,00	99.320.000,00 189.162.500,00	99,32 99,31

No	Program Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase
18	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian (TPH Bund), (Disnak Keswan)	149.925.400,00	149.103.900,00	99,45
		23.543.000,00	23.543.000,00	100,00
19	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian (TPH Bund), (DKP), (Disnak Keswan)	185.909.800,00	178.773.550,00	96,16
		61.000.000,00	50.000.000,00	81,97
		276.742.000,00	275.806.061,00	99,66
20	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Perikanan (Perikanan)	175.000.000,00	174.868.750,00	99,93
21	Program Pengelolaan TPI dan Pemberdayaan Nelayan (Perikanan)	1.200.534.200,00	1.022.336.050,00	85,16
22	Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya (Perikanan)	1.123.415.450,00	1.098.996.177,00	97,83
23	Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri (Disdag)	120.000.000,00	119.499.200,00	99,58
24	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (Disdag)	2.338.039.000,00	2.312.854.459,00	98,92
25	Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Disdag)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
26	Program Pengembangan perdagangan (Disdag)	392.471.950,00	391.182.950,00	99,67
27	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen (Disdag)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
28	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (DPMPPTSP)	190.000.000,00	187.000.000,00	98,42

Prosentase rata-rata realisasi anggaran program strategis mencapai 97,52% sedangkan pencapaian target indikator sasaran strategis mencapai 2.456,66%. Hal ini mengindikasikan telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya keuangan.

4)Misi 4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, menjunjung tinggi hukum, demokratis dan memberdayakan perempuan berlandaskan nilai agama dan budaya.

No	Program Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sekda), (Pol Pp)	62.793.200,00	60.687.450,00	96,65
		3.907.218.500,00	3.907.019.400,00	99,99
2	Program Penanggulangan Bencana Daerah	247.750.000	247.739.000	100,00

3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	241.000.000,00	241.000.000,00	100,00
4	Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat (Sekda)	7.056.200.000,00	5.090.956.500,00	72,15
5	Program Pelestarian Budaya (Disparbud)	2.125.975.000,00	2.109.514.500,00	99,23
6	Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	10.936.350.000,00	10.626.541.939,00	97,17
7	Program peningkatan wawasan kebangsaan (Sekda)	164.327.000,00	160.867.000,00	97,89
8	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Sekda)	31.413.000,00	14.853.000,00	47,28

Prosentase rata-rata realisasi anggaran program strategis mencapai 90,04 % sedangkan pencapaian target indikator sasaran strategis mencapai 99,88%. Hal ini mengindikasikan telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya keuangan.

5) Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Professional.

No	Program Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Program Penguatan KORPS Pegawai Republik Indonesia	287.000.000,00	286.999.000,00	100,00
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Sekda), (DPRD), (Dispora)	608.560.000,00 670.000.000,00 233.835.000,00	596.750.000,00 665.625.000,00 143.085.000,00	98,06 99,32 61,19
3	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah (BKD)	2.224.711.500,00	1.983.130.908,00	89,14
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Sekda), (BPKAD), (PU), (Disdag), (PP & RD), (Perpus), (Capil), (DPRD)	52.500.000,00 35.000.000,00 270.000.000,00 9.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 585.000.000,00	52.500.000,00 14.400.000,00 270.000.000,00 4.245.000,00 5.400.000,00 20.000.000,00 6.950.000,00 584.210.941,00	100,00 41,14 100,00 47,17 18,00 100,00 69,50 99,87
5	Program Pemerintahan Desa (Sekda), (DPMD)	337.500.000,00 436.967.500,00	297.129.550,00 436.590.150,00	88,04 99,91
6	Program Penataan Produk Hukum Daerah (Sekda), (DPRD), (POL PP)	961.854.221,00 982.402.000,00 534.544.000,00	961.854.221,00 961.854.221,00 532.134.000,00	100,00 97,91 99,55
7	Program Penegakan Perda (Pol Pp)	171.000.000,00	171.000.000,00	100,00

No	Program Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase
8	Program Peningkatan Kualitas Personil Sat Pol PP	36,000,000	36,000,000	100,00
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Litbang), (Bappeda)	76.000.000,00 2.051.749.000,00	73.803.900,00 1.954.836.094,00	97,11 95,28
10	Program Penelitian, pengembangan dan inovasi daerah (Litbang)	223.000.000,00	221.668.750,00	99,40
11	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Bappeda)	435.000.000,00	428.104.934,00	98,41
12	Program Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan (TPH Bund)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
13	Program Pengelolaan Administrasi Tanah, Izin Lokasi, serta Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah (Disperkim)	294.949.000,00	292.304.680,00	99,10
14	Program Pengembangan Data, Informasi Statistik, dan Persandian Daerah (TPH Bund), (DKP), (Disdik), (Disnaker), (Diskoper), (PU), (Bappeda)	46.130.000,00 57.540.000,00 24.421.000,00 29.900.000,00 27.587.200,00 180.000.000,00 198.000.000,00	39.679.911,00 57.502.500,00 24.421.000,00 26.288.600,00 27.587.200,00 178.099.000,00 197.852.000,00	86,02 99,93 100,00 87,92 100,00 98,94 99,93
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekda), (Bappeda), (BPKAD), (PP RD)	148.442.750,00 3.041.220.950,00 3.107.637.600,00 3.041.220.950,00	148.425.450,00 2.704.508.600,00 2.873.979.332,00 2.704.508.600,00	99,99 88,93 92,48 88,93
16	Program Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD)	618.250.000,00	586.826.000,00	94,92
17	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Sekda)	766.386.200,00	752.222.200,00	98,15
18	Program Penataan Administrasi Wilayah (Sekda)	204.972.800,00	180.930.250,00	88,27
19	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD (Sekda), (DPRD)	6.433.734.100,00 228.000.000,00	4.880.931.002,00 226.380.000,00	75,86 99,29
20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Sekda)	16.410.411.625,00	15.441.446.052,00	94,10
21	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan (Sekda)	806.360.150,00	664.299.349,00	82,38
22	Program Penguatan KORPS Pegawai Republik Indonesia	287.000.000,00	286.999.000,00	100,00

Prosentase rata-rata realisasi anggaran program strategis mencapai 92,45% sedangkan pencapaian target indikator sasaran strategis mencapai 160,62%. Hal ini mengindikasikan telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya keuangan.

d. Analisis Dukungan terhadap Program Prioritas Nasional

Pencapaian dari target indikator kinerja dalam sasaran pada masing-masing misi dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan dengan baik pada Tahun Anggaran 2018 dapat mendukung pencapaian dukungan terhadap program prioritas nasional Tahun Anggaran 2018 dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan dalam Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2018.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama.

Kinerja Keuangan Daerah tahun 2018, sebagaimana dituangkan didalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	2	3	4
PENDAPATAN	2.135.406.877.986,00	2.076.666.321.131,17	58.740.556.854,83
PENDAPATAN ASLI DAERAH	240.604.045.906,00	215.411.464.185,87	25.192.581.720,13
Pendapatan Pajak Daerah	111.110.162.106,00	91.955.613.770,01	19.154.548.335,99
Hasil Retribusi Daerah	8.707.886.000,00	9.160.120.239,00	(452.234.239,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.700.000.000,00	6.783.912.082,51	(83.912.082,51)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	114.085.997.800,00	107.511.818.094,35	6.574.179.705,65
PENDAPATAN TRANSFER	1.795.411.432.080,00	1.761.043.856.945,30	(34.367.575.134,70)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.218.211.496.948,00	1.203.772.824.191,00	14.438.672.757,00
Dana Bagi Hasil Pajak	36.682.324.463,00	26.675.426.577,00	10.006.897.866,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	15.483.633.485,00	13.199.205.438,00	2.284.428.047,00
Dana Alokasi Umum	1.019.207.779.000,00	1.019.207.779.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	146.837.760.000,00	144.690.413.176,00	2.147.346.824,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	2	3	4
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	467.560.974.000,00	463.881.577.859,00	3.679.396.141,00
Dana Penyesuaian	467.560.974.000,00	463.881.577.859,00	3.679.396.141,00
Transfer Pemerintah Provinsi	109.638.961.132,00	93.389.454.895,30	16.249.506.236,70
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	109.638.961.132,00	93.389.454.895,30	16.249.506.236,70
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	99.391.400.000,00	100.211.000.000,00	(819.600.000,00)
Pendapatan Hibah	99.391.400.000,00	100.211.000.000,00	(819.600.000,00)
Pendapatan Lainnya	0,00	1.000.000.000,00	0,00
BELANJA	2.221.831.888.511,21	1.973.629.399.243,26	248.202.489.267,95
BELANJA OPERASI	1.669.509.163.129,21	1.582.166.293.516,37	87.342.869.612,84
Belanja Pegawai	929.370.799.854,63	873.232.163.566,00	56.138.636.288,63
Belanja Barang	376.400.998.742,58	348.256.672.571,37	28.144.326.171,21
Belanja Bunga	5.400.000.000,00	5.379.289.339,00	20.710.661,00
Belanja Hibah	22.959.220.000,00	21.596.946.000,00	1.362.274.000,00
Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	342.500.000,00	157.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	334.878.144.532,00	333.358.722.040,00	1.529.422.492,00
BELANJA MODAL	542.647.658.045,00	383.352.881.955,00	159.294.776.090,00
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	38.777.497.400,00	32.677.032.010,00	6.100.465.390,00
Belanja Bagunan dan Gedung	74.031.853.643,00	66.751.951.153,00	7.279.902.490,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	395.314.406.451,00	250.051.137.400,00	145.263.269.051,00
Belanja aset tetap lainnya	3.556.500.000,00	3.007.304.800,00	(26.516.548.000,00)
Belanja Aset Lainnya	30.967.400.551,00	30.865.456.592,00	101.943.959,00
BELANJA TAK TERDUGA	3.684.164.337,00	2.139.033.103,89	1.545.131.233,11
Belanja tak terduga	3.684.164.337,00	2.139.033.103,89	1.545.131.233,11
TRANSFER	5.990.903.000,00	5.971.190.668,00	19.712.332,00
Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	5.990.903.000,00	5.971.190.668,00	19.712.332,00
Bagi Hasil Pajak	5.990.903.000,00	5.971.190.668,00	19.712.332,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(86.425.010.525,21)	103.036.921.887,91	(189.461.932.413,12)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN DAERAH	110.587.010.525,21	110.985.001.876,21	(397.991.351,00)
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	110.587.010.525,21	110.755.691.876,21	(168.681.351,00)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	229.310.000,00	229.310.000,00
PENGELUARAN DAERAH	24.162.000.000,00	24.161.122.400,00	877.600,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	24.162.000.000,00	24.161.122.400,00	877.600,00
PEMBIAYAAN NETTO	86.425.010.525,21	86.823.879.476,21	(398.868.951,00)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN	0,00	189.860.801.364,12	189.860.801.364,12

Dalam mencapai visi dan misi, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2018 maupun Perjanjian Kinerja dengan Penetapan Kinerja tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian kinerja sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan maupun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari penilaian sendiri (self assesment) berdasarkan penetapan kategorisasi pencapaian kinerja kedalam empat kategori, maka hasil capaian kinerja sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dapat disimpulkan sebesar 578,11 % yang mencapai nilai baik, dengan rincian sebagai berikut :

- **Misi 1. Membangun Infrastruktur Untuk Mempercepat Kemajuan Desa Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah**
Hasil pengukuran kinerja pada Misi 1 dengan 3 (tiga) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerjanya, diperoleh hasil pengukuran kinerja sebesar 89,89% yang mencapai nilai baik.
- **Misi 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik, terjangkau dan proaktif.**
Hasil pengukuran kinerja pada Misi 2 dengan 7 (tujuh) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerjanya, diperoleh hasil pengukuran kinerja sebesar 83,52% yang mencapai nilai baik.
- **Misi 3. Membangun perekonomian daerah dengan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan perdesaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.**

Hasil pengukuran kinerja pada Misi 3 dengan 8 (delapan) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) indikator kinerjanya, diperoleh hasil pengukuran kinerja sebesar 2.456,66% yang mencapai nilai baik.

- Misi 4. **Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, menjunjung tinggi hukum, demokratis dan memberdayakan perempuan berlandaskan nilai agama dan budaya.**

Hasil pengukuran kinerja pada Misi 4 dengan 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerjanya, diperoleh hasil pengukuran kinerja sebesar 99,88% yang mencapai nilai baik.

- Misi 5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Professional.**

Hasil pengukuran kinerja pada Misi 5 dengan 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerjanya, diperoleh hasil pengukuran kinerja sebesar 160,62% yang mencapai nilai baik.

Hasil capaian 42 (empat puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki kedepan.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tentu belum tuntas dan menyeluruh mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan yang berkembang serta masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sepanjang tahun tersebut. Kegiatan-kegiatan yang belum tertampung dalam anggaran murni dan perubahan APBD tahun anggaran 2018, tentunya akan diupayakan untuk diakomodir dalam tahun anggaran berikutnya.

Agar pelaksanaan kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme penyusunan rencana pelaksanaan kinerja akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia. Selain itu, akan dilakukan optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kinerja yang dilaksanakan.

**BAB
I****PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan semangat reformasi, penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi komitmen nasional sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN tersebut adalah asas akuntabilitas yang mewajibkan setiap penyelenggara negara mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan kinerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah diamanatkan.

Sejalan dengan pelaksanaan asas tersebut dan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Daerah diwajibkan untuk melaporkan prestasi kerjanya berdasarkan Penetapan Kinerja.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj IP Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada setiap tahun anggaran. Dari laporan tersebut diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian kinerja atas tugas pokok dan fungsi serta dapat dimanfaatkan sebagai :

- a. Bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan 2016-2021.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

1. LKj IP tahun 2017 merupakan laporan akuntabilitas kinerja periode pertama dalam pelaksanaan RPJMD 2016-2021.
2. LKj IP melaporkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

tahun 2016 yang terlaksana dalam bentuk kebijakan dan program strategik sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2016-2021. Sedangkan kinerja kegiatan yang dilaporkan merupakan kegiatan yang tertuang secara operasional dalam APBD-P Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017.

3. Indikator kinerja yang dilaporkan atas setiap kegiatan yang dilaksanakan adalah indikator masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*), sedangkan indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) belum dapat dilakukan pengukuran kinerja.
4. Kinerja yang dilaporkan dalam LKj IP ini merupakan kinerja sasaran strategis yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

D. GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan

a. Aspek Geografi dan Administrasi Pemerintahan

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105°14' sampai dengan 105°45' Bujur Timur dan 5°15' sampai dengan 6° Lintang Selatan, dengan demikian sama seperti daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis. Daerah yang terletak paling ujung bagian selatan pulau Sumatera ini memiliki sebuah pelabuhan di kecamatan Bakauheni dan merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan demikian pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang pulau Sumatera. Jarak antara pelabuhan Bahauheni Lampung Selatan dengan pelabuhan Merak Provinsi Banten kurang lebih 29 km dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Selain memiliki pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki bandara Raden Inten II yang terletak di Kecamatan Natar.



Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih adalah 2,007.01 km² (berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan), dengan Kantor Pusat Pemerintahan di Kota Kalianda, yang diresmikan menjadi Ibukota Kabupaten Lampung Selatan oleh Menteri Dalam Negeri pada Tanggal 11 Februari 1982. Berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Tanggamus, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2006, terjadi pemekaran Kabupaten Pesawaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada Tahun 2008, terjadi pemekaran di Kabupaten Lampung Selatan yaitu, Kecamatan Tanjung Sari, Way Sulan, Way Panji, dan Kecamatan Bakauheni, dengan demikian jumlah Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan secara eksisting berjumlah 17 kecamatan dan selanjutnya terdiri dari desa-desa dan kelurahan sebanyak 256 desa dan 4 kelurahan.

Kecamatan Natar sebagai kecamatan terluas di Kabupaten Lampung Selatan dengan Wilayah seluas 213.77 km². Sedangkan Kecamatan Way Panji sebagai kecamatan terkecil dengan Wilayah seluas 38,45 km². Berikut luas Kabupaten Lampung Selatan dirinci per Kecamatan:

Tabel 1.1
Luas Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Nama Ibukota	Luas (km ²)
1	Natar	Merak Batin	213.77
2	Jati Agung	Marga Agung	164.47
3	Tanjung Bintang	Jati Baru	129.72
4	Tanjung Sari	Kerto Sari	103.32
5	Katibung	Tanjung Ratu	175.77
6	Merbau Mataram	Merbau Mataram	113.94
7	Way Sulan	Karang Pucung	46.54
8	Sidomulyo	Sidorejo	122.53
9	Candipuro	Titiwangi	84.69
10	Way Panji	Sidoharjo	38.45
11	Kalianda	Kalianda	161.40
12	Rajabasa	Banding	100.39
13	Palas	Bangunan	171.39
14	Sragi	Kuala Sekampung	81.92
15	Penengahan	Pasuruan	132.98
16	Ketapang	Bangun Rejo	108.60
17	Bakauheni	Hatta	57.13
Jumlah			2,007.01

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2017

Kabupaten Lampung Selatan mempunyai beberapa gunung, yang tertinggi adalah Gunung Rajabasa di Kecamatan Rajabasa, dengan ketinggian 1.280 mdpl, sedangkan sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Lampung Selatan antara lain antara lain Way Sekampung, Way Jelai, Way Katibung, Way Pisang dan Way Gatal. Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki Kawasan Hutan Suaka/Taman/Lahan suatu kawasan yang cukup luas.

Iklim di Kabupaten Lampung Selatan sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh angin Muson, maka daerah Lampung Selatan tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan. Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, antara lain:

1) Tanah Latosol

Jenis tanah ini paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, hampir menutupi seluruh wilayah barat dan sebagian besar dari bagian tengah. Tanah latosol berwarna coklat tua sampai kemerah-merahan adalah hasil pelapukan bahan induk kompleks turfinmedier. Penyebaran pada daerah bertopografi bergelombang sampai bergunung.

2) Tanah Podsolik

Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk turfazam sedimen batuan plotonik yang bersifat asam, tersebar pada wilayah yang bertopografis berbukit sampai bergunung. Tanah podsolik berwarna merah kuning, juga terdapat di daerah yang luas, tersebar pada wilayah bagian utara Kabupaten Lampung Selatan.

3) Tanah Andosol

Jenis tanah ini adalah pelapukan dari bahan induk kompleks turfinmedier dan basah, berwarna coklat sampai hitam. Penyebarannya terdapat pada daerah bertopografis bergelombang

sampai bergunung. Jenis tanah ini tidak begitu banyak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

4) Tanah Hidromorf

Tanah Hidromorf adalah hasil pelapukan dari bahan induk sedimen turfazam sampai entermedier, berwarna kelabu, terdapat pada daerah datar sampai berombak. Tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan bagian timur.

5) Tanah Alluvial

Jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk endapan marine atau endapan sungai-sungai, terdapat pada daerah dengan bentuk wilayah datar.

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2017 adalah berjumlah 992.763 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sejumlah 509.303 jiwa dan perempuan sejumlah 483.460 jiwa. Berikut ini adalah sebaran penduduk di Kabupaten Lampung Selatan per kecamatan pada Tahun 2017 menurut BPS.

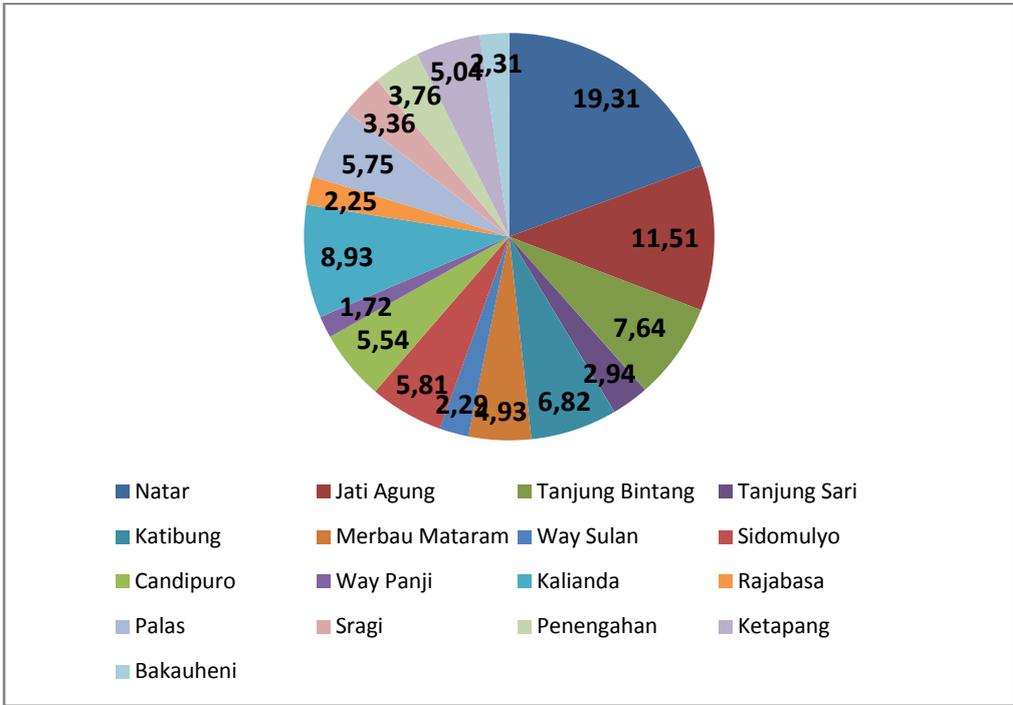
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Natar	97.705	94.002	191.707
2	Jati Agung	59.018	55.251	114.269
3	Tanjung Bintang	38.594	37.240	75.834
4	Tanjung Sari	14.913	14.275	29.188
5	Katibung	34.822	32.910	67.732
6	Merbau Mataram	25.118	23.801	48.919
7	Way Sulan	11.657	11.035	22.692
8	Sidomulyo	29.561	28.140	57.701
9	Candipuro	28.092	26.919	55.011
10	Way Panji	8.567	8.482	17.049
11	Kalianda	46.229	42.452	88.681
12	Rajabasa	11.764	10.595	22.359
13	Palas	28.969	28.078	57.047
14	Sragi	17.030	16.348	33.378
15	Penengahan	19.282	18.046	37.328
16	Ketapang	25.665	24.328	49.993
17	Bakauheni	12.317	11.558	23.875
Jumlah		509.303	483.460	992.763

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

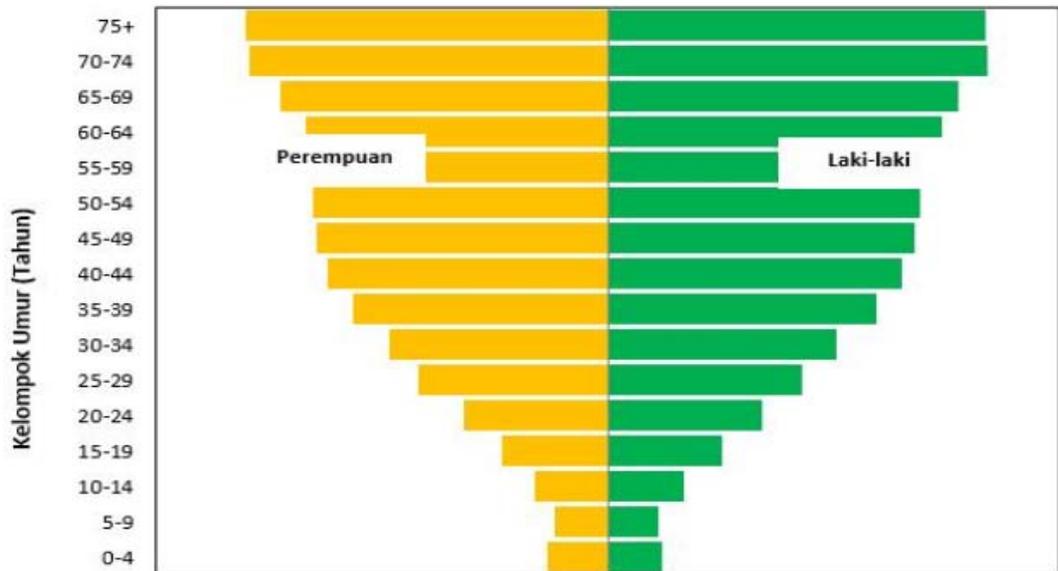
Diagram 1.1
 Persentase Jumlah Penduduk Per Kecamatan

PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN



Berdasarkan piramida penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017, diketahui bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Lampung Selatan memiliki kecenderungan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Lampung Selatan berusia diatas 65 tahun. Hal tersebut mencerminkan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Lampung Selatan telah melewati usia produktifnya.

Diagram 1.2
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Kabupaten Lampung Selatan memiliki 42 pulau, besar maupun kecil, dengan pulau terbesar adalah Pulau Sebesi dengan luas 4.643 Ha. Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki garis pantai terpanjang se-Provinsi Lampung dengan panjang 182 km². Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan sangat berpotensi dalam hal positif, seperti peluang perkembangan pariwisata, maupun berpotensi dalam hal negatif seperti potensi bencana. Terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang termasuk dalam daerah yang berpotensi rawan bencana tsunami. Berikut adalah persebaran potensi rawan bencana per kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

b. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total keseluruhan dari nilai tambah (*value added*) yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi. PDRB merupakan data statistik yang dapat dijadikan ukuran kuantitatif guna mengevaluasi dan memonitor hasil pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah. Perkembangan PDRB sangat ditentukan oleh potensi ekonomi yang ada serta kondisi sosial dan politik

yang kondusif. Dalam prakteknya PDRB terdiri dari PDRB atas harga berlaku yang memiliki kaitan erat dengan analisis pendapatan perkapita dan PDRB atas harga konstan yang dapat digunakan sebagai analisis tingkat pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan angka PDRB Kabupaten Lampung Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan. PDRB Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan trend positif dimana PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017 mencapai angka Rp. 38.566.985.100.000,- (tiga puluh delapan triliun lima ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp. 27.359.532,800.000,- (dua puluh tujuh triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Tabel 1.3
PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013–2017

Tahun	PDRB ADHB (JutaRupiah)	PDRB ADHK (JutaRupiah)
2013	25.250.404,93	22.113.697,80
2014	28.269.093,77	23.396.572,61
2015	31.412.780,96	24.654.678,46
2016	34.903.655,19	25.942.709,01
2017	38.566.985,10	27.359.532,80

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, dan konstruksi. Selama kurun waktu 2013-2017, lebih dari 30 persen struktur perekonomian Kabupaten Lampung Selatan berasal dari sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kemudian sektor industri pengolahan sebesar 24,33 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 11,52 persen, sektor konstruksi sebesar 11,45 persen dan transportasi dan pergudangan sebesar 6,36 persen. Sedangkan untuk sektor-

sektor lain menyumbang kontribusi tidak lebih dari 3 persen dengan sektor pengadaan listrik dan gas serta jasa perusahaan menyumbang kontribusi terkecil sebesar 0,09 persen.

Dari uraian di atas juga terlihat bahwa sumbangsih atau peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan makin menurun dari tahun ke tahun, namun untuk sektor industri pengolahan dan sektor transportasi dan pergudangan cenderung mengalami peningkatan, walaupun pada Tahun 2017 perkembangan distribusi sektor industri pengolahan mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan Tahun 2016. Hal ini sebagai dampak perlambatan perekonomian dunia yang cenderung menurun di Tahun 2017. Diharapkan dengan meningkatnya perkembangan sektor industri pengolahan maka hasil atau produk dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang memang banyak dihasilkan di Kabupaten Lampung Selatan dapat diolah lebih lanjut atau dapat dimanfaatkan di sektor industri baik industri kecil, menengah, maupun besar sehingga nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan dapat meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Analisa pertumbuhan ekonomi adalah suatu bentuk analisis terhadap parameter PDRB yang menggambarkan perkembangan suatu sektor secara riil dan objektif. Riil dalam arti bahwa angka pertumbuhan diperoleh dengan mengeliminir pengaruh kenaikan harga (inflasi). Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah bahwa kenaikan/penurunan nilai tambah tersebut perbandingnya adalah nilai tambah sektor yang bersangkutan pada tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan.

Dengan demikian angka pertumbuhan ini merupakan suatu indikator yang cukup relevan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Sehingga dapat diambil langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan pembangunan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun langkah yang diambil tidak terlepas dari seberapa besar peran sektor terhadap pertumbuhan, kondisi fundamental ekonomi dan bagaimana

tingkat urgensi dari suatu kebijakan terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya.

Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2013–2017 terjadi penurunan, hal ini terlihat dari angka pertumbuhan yang cenderung menurun selama tiga tahun terakhir, dan hal ini dialami oleh sebagian besar wilayah Indonesia. Adapun penyebab lemahnya perekonomian Regional dan Nasional pada Tahun 2017 diantaranya terjadi karena adanya perlambatan perekonomian global, terutama imbas dari memburuknya ekonomi di China dan menguatnya kondisi ekonomi Amerika khususnya terhadap nilai tukar Rupiah dan Dollar.

Dalam mengantisipasi dan mencegah dampak yang mungkin timbul dari berbagai krisis keuangan dan perekonomian global seperti melambungnya harga minyak dunia, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang dapat menjaga stabilitas perekonomian daerah, utamanya adalah memperkuat basis pondasi bangunan perekonomian kabupaten terutama disektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian). Karena dominasi sektor primer diharapkan dapat menyebabkan perekonomian daerah dapat tetap tumbuh positif ditengah kelesuan perekonomian nasional dan regional. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan peningkatan kapasitas daerah, yang berarti kemampuan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan menghasilkan output semakin meningkat. Peningkatan kapasitas ini terkait dengan daya dukung teknologi, modal, infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia serta ketersediaan sumber daya alam.

Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2013–2017

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Kabupaten Lampung Selatan	Provinsi Lampung	Nasional
2013	6,41	5,80	5,56
2014	5,80	5,08	5,02
2015	5,38	5,13	4,88
2016	5,22	5,15	5,02
2017			

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

c. Laju Inflasi

Angka inflasi menggambarkan rata-rata perubahan harga antar periode waktu tertentu dari sejumlah kelompok barang/jasa yang banyak menjadi kebutuhan masyarakat. Inflasi daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dicerminkan oleh inflasi Kota Kalianda selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus stabil dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 yang lalu, inflasi Kota Kalianda tercatat sebesar 4,44 persen, selanjutnya menurun pada Tahun 2017 hingga menjadi sebesar 3,44 persen. Pada Tahun 2017, inflasi Kota Kalianda kembali mengalami penurunan hingga mencapai angka sebesar 3,88 persen.

Tabel 1.5. Laju Inflasi di Kota Kalianda Tahun 2013-2017

Tahun	Persentase Inflasi		
	Kalianda	Lampung	Indonesia
2013	6,76	7,56	8,38
2014	6,18	8,36	8,36
2015	4,44	4,65	3,35
2016	3,44	2,78	3,02
2017	3,88	3,14	3,61

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa meski laju inflasi Kota Kalianda cenderung mengalami penurunan tetapi laju inflasi tersebut masih berada di atas laju inflasi di Provinsi Lampung dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu mengoptimalkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya menjaga stabilitas harga yang bisa berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

d. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita. Indikator pendapatan per kapita dapat juga digunakan untuk menilai apakah upaya

pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, apabila disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk.

PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan didapat PDRB per kapita dan dapat digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita. PDRB per kapita ADHK menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Tabel 1.6. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2017 (Rupiah/jiwa)

Tahun	PDRB per Kapita ADHB	PDRB per Kapita ADHK
2013	26.392.169,80	23.200.697,91
2014	29.206.542,70	24.310.343,52
2015	32.340.250,20	25.349.795,24
2016	35.511.434,00	26.394.450,50
2017	38.566.985,10	27.359.532,80

Sumber : BPS Kab. Lampung Selatan, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa trend laju pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan periode Tahun 2013-2017 cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2017 berdasarkan harga berlaku adalah sebesar Rp. 38.566.985,10 dan harga konstan adalah sebesar Rp. 27.359.532,80

2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dipimpin oleh NANANG ERMANTO dengan susunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan meliputi :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah (Pelaksana Urusan Pemerintahan), terdiri dari :
 - 1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - 2) Dinas Pendidikan
 - 3) Dinas Kesehatan
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 5) Dinas Perumahan dan Permukiman
 - 6) Dinas Sosial
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 9) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 10) Dinas Ketahanan Pangan
 - 11) Dinas Lingkungan Hidup
 - 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 14) Dinas Perhubungan
 - 15) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - 18) Dinas Kepemudaan dan Olah raga
 - 19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 20) Dinas Perikanan
 - 21) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - 22) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - 23) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 24) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- e. Badan Daerah (Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan), terdiri dari :
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Badan Penelitian dan Pengembangan
 - 3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - 4) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 - 5) Badan Kepegawaian dan Diklat

- f. Fungsi Penunjang Lain, terdiri dari :
 - 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
 - 4) RSUD Bob Bazar, SKM (Perda Nomor 06 Tahun 2008)
- g. Kecamatan, terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Natar
 - 2) Kecamatan Tanjung Bintang
 - 3) Kecamatan Kalianda
 - 4) Kecamatan Sidomulyo
 - 5) Kecamatan Katibung
 - 6) Kecamatan Penengahan
 - 7) Kecamatan Palas
 - 8) Kecamatan Jati Agung
 - 9) Kecamatan Ketapang
 - 10) Kecamatan Sragi
 - 11) Kecamatan Rajabasa
 - 12) Kecamatan Candipuro
 - 13) Kecamatan Merbau Mataram
 - 14) Kecamatan Bakauheni
 - 15) Kecamatan Tanjung Sari
 - 16) Kecamatan Way Sulan
 - 17) Kecamatan Way Panji
- h. Kelurahan, terdiri dari :
 - 1) Kelurahan Bumi Agung
 - 2) Kelurahan Kalianda
 - 3) Kelurahan Way Urang
 - 4) Kelurahan Wai Lubuk
- i. 256 Desa

3. Permasalahan Strategis Dan Kebijakan Strategis

a. Permasalahan Strategis

Permasalahan utama (isu strategis) yang dihadapi oleh kabupaten lampung selatan antara lain meliputi :

- 1) jaringan transportasi wilayah, penataan kawasan pemukiman, layanan telekomunikasi dan informasi, penataan tata ruang, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan.
- 2) Rendahnya ketersediaan cakupan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas masyarakat.
- 3) Belum optimalnya kualitas hidup masyarakat di bidang pendidikan kesehatan dan pendapatan.
- 4) Belum terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan pada struktur perekonomian yang kokoh.

b. Kebijakan Strategis

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Selatan, maka ditetapkan 36 kebijakan pembangunan sebagai berikut :

- 1) Pemantapan sistem dan jaringan transportasi wilayah.
- 2) Peningkatan tata kelola penyelenggaraan dan pemanfaatan kawasan permukiman.
- 3) Perluasan layanan telekomunikasi dan informasi.
- 4) Penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas lima tahunan RTRW.
- 5) Penguatan pelayanan dan daya saing pendidikan.
- 6) Penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada seluruh siklus kehidupan, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat.
- 7) Penguatan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana, serta pembangunan keluarga.

- 8) Peningkatan daya saing ketenagakerjaan.
- 9) Pembangunan dan Perlindungan Anak.
- 10) Perluasan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial secara komprehensif.
- 11) Peningkatan karakter (character building), peran pemuda dan prestasi olahraga.
- 12) Pembangunan sumber daya manusia dan pembentukan modal sosial masyarakat Desa.
- 13) Revitalisasi sektor pertanian dan perikanan.
- 14) Peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
- 15) Akselerasi pertumbuhan sektor industri, baik industri besar, menengah maupun kecil.
- 16) Peningkatan daya saing dan optimalisasi penanaman modal serta peningkatan pelayanan perizinan.
- 17) Peningkatan tata kelola barang dan jasa.
- 18) Peningkatan daya saing pariwisata
- 19) Peningkatan kinerja Koperasi dan UMKM.
- 20) Pengembangan kelembagaan ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat perdesaan.
- 21) Pemetaan potensi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara langsung.
- 22) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan keaneka ragaman hayati.
- 23) Optimalisasi penanganan gangguan keamanan, ketertiban, dan bencana.
- 24) Internalisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai agama dan budaya.
- 25) Pengembangan infrastruktur dan suprastruktur politik.
- 26) Pembangunan Berkesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- 27) Peningkatan kualitas perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah.

- 28) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data statistik dan informasi pembangunan serta persandian daerah.
- 29) Peningkatan kualitas tatakelola keuangan dan aset daerah.
- 30) Meningkatkan pemanfaatan potensi pendapatan asli daerah.
- 31) Penguatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah.
- 32) Penguatan penyelenggaraan manajemen ASN yang profesional.
- 33) Perkuatan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.
- 34) Perkuatan penyelenggaraan pemerintahan umum.
- 35) Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa.
- 36) Optimalisasi pendayagunaan peraturan perundang-undangan dan tata peraturan daerah.

4. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kabupaten Lampung Selatan selama Tahun 2017. Capaian kinerja Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif, menjelaskan secara ringkas pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.

Bab I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, ruang lingkup, gambaran umum,

Permasalahan dan kebijakan strategis.

- Bab II. Perencanaan Kinerja,** menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 meliputi RPJMD Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja,** menjelaskan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2018
- Bab IV. Penutup,** menjelaskan simpulan umum dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

**BAB
II**

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perencanaan strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan merasa perlu memiliki dokumen perencanaan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan berbasis kinerja. Dokumen perencanaan dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi waktu perencanaan 5 tahunan.

Uraian lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. VISI

Visi Kabupaten Lampung Selatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 adalah “*Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri, dan Berakhlak Mulia*”.

2. MISI

Sesuai dengan visi tersebut di atas, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Membangun Infrastruktur Untuk Mempercepat Kemajuan Desa Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik, terjangkau dan proaktif.
- c. Membangun perekonomian daerah dengan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan perdesaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- d. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, menjunjung tinggi hukum, demokratis dan memberdayakan perempuan berlandaskan nilai agama dan budaya.
- e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Professional.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan misi yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Lampung Selatan**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET														
					2016	2017	2018	2019	2020	2021									
1	Membangun infrastruktur untuk mempercepat kemajuan desa sesuai dengan tata ruang wilayah	1	Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat	1	Persentase akses jalan, jembatan dan irigasi yang baik bagi masyarakat	1	Meningkatnya Jalan, Jembatan dan Irigasi	1	Persentase konstruksi Jalan Kabupaten dengan permukaan berpenutup aspal (hotmix)/beton semen pada Jaringan Jalan Kabupaten (persen)	43.88	52.6	76.3	100	100	100				
								2	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (persen)	39	43	55	75	90	100				
								3	Panjang Jalan Desa/Lingkungan dengan kondisi mantap (persen)	21.82	29.46	37.09	44.73	52.36	60				
								4	Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dengan kondisi mantap (persen)	64.06	70	85	100	100	100				
								2	Meningkatnya aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah	2	Meningkatnya aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah	1	Persentase desa yang terhubung dengan pusat kecamatan	20	33.33	46.67	60	73.33	100
												2	Persentase Desa yang terhubung dengan Jaringan Telekomunikasi (persen)	25	50	80	85	90	100
												3	Persentase desa yang teraliri listrik	75	80	90	95	100	100
		3	Kondisi lingkungan pemukiman yang layak dan sehat	3	Kondisi lingkungan pemukiman yang layak dan sehat	1	Persentase desa yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air	48.28	65.52	82.76	100	100	100						

3	Membangun perekonomian daerah dengan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan pedesaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	1	Rata - rata Laju pertumbuhan ekonomi	1	Menurunnya angka kemiskinan	1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (persen)	84.42	85.94	87.45	88.97	90.48	92		
								2	Indeks koefisien GINI (indeks)	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.2		
								2	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan	1	Indeks desa membangun (2015=0,612)	0.62	0.63	0.64	0.66	0.67	0.68
										2	Jumlah warung desa yang menghasilkan laba	-	34	84	150	200	260
								3	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas	1	Pertumbuhan ekonomi (persen)	6.17	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6
										2	PDRB ADHB (milyar rupiah)	31,500	32,000	33,000	34,000	35,000	36,000
										3	Inflasi Kota Kalianda (angka)	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
										4	Persentase PAD terhadap penerimaan daerah (persen)	7.48	10	10.55	11.12	11.88	12.75
								4	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan perkapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi	1	Pola pangan harapan konsumsi (angka)	79.5	80	80.5	81	81.5	82
										2	Pola pangan harapan ketersediaan (angka)	81	81.5	82	82.5	83	83.5
								5	Meningkatnya peran sektor industri terhadap PDRB	1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (persen)	26.07	28.26	30.44	32.63	34.81	37
								6	Peningkatan kontribusi investasi/ penanaman modal dalam perekonomian daerah	1	Persentase peningkatan investasi PMDN (persen)	5	5	5	5	5	5
										2	Persentase peningkatan investasi PMA (persen)	10	10	10	10	10	10
								7	Meningkatnya peran pariwisata daerah	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen)	1.46	1.52	1.58	1.64	1.7	1.76

					8	Stabilitas pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB	1	Persentase sektor pertanian terhadap PDRB (persen)	31.1	31	30.85	30.6	30.25	30	
							2	Nilai tukar petani	107	110	113	116	118	120	
4	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, menjunjung tinggi hukum, demokratis dan memberdayakan perempuan berlandaskan nilai agama dan budaya	1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang nyaman, beradab dan bermartabat berlandaskan nilai agama dan budaya	1	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	1	Terwujudnya kondisi sosial masyarakat yang baik berdasarkan nilai agama dan budaya	1	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (persen)	100	100	100	100	100	100
				2	Kesetaraan Gender	2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88.82	88.96	89.25	89.50	89.8	90.72
								2	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100
5	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan profesional	1	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Demokratis, Responsif, dan Transparan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi	65	70	75	80	85	90
						2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	1	Nilai SAKIP	C	CC	B	B	BB	A
								2	OPINI BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
						3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) (indeks)	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7

4. STRATEGI/CARA PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 tersebut ditetapkan strategi/cara pencapaian tujuan dan sasaran yang terurai dalam Kebijakan, Program Strategik, dengan uraian di bawah ini :

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat	1	Meningkatnya Jalan, Jembatan dan Irigasi	1	Pemantapan sistem dan jaringan transportasi wilayah	1	Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung perkembangan dan investasi pada kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
		2	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah			2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi yang seimbang antara penyediaan prasarana dan sarana, efektifitas pelayanan, terutama ketertiban, keselamatan dan keandalan serta kenyamanan, dampak lingkungan, dan keterjangkauan dan pemerataan pelayanan
				2	Perluasan layanan telekomunikasi dan informasi		Peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh pusat pelayanan dan wilayah pelayanannya

		3	Kondisi lingkungan pemukiman yang layak dan sehat	1	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan dan pemanfaatan kawasan permukiman	1	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas, layak, dan sehat melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup
				2	Penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas lima tahunan RTRW	1	Pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)
				3	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan keaneka ragaman hayati	1	Meningkatkan perbaikan fungsi lingkungan dalam upaya mengendalikan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup pada air, hutan dan lahan, udara dan keanekaragaman hayati
2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	1	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	1	Penguatan pelayanan dan daya saing pendidikan	1	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan bermutu
		2	Meningkatnya kualitas Derajat kesehatan masyarakat	1	Penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat	1	Peningkatan upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan
		3	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1	Pembangunan sumber daya manusia dan pembentukan modal sosial dan masyarakat desa	1	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana serta sosial dasar kemasyarakatan lainnya
				2	Perluasan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial secara komprehensif	1	Penjaminan penanganan risiko guncangan dan kerentanan sosial serta ketidakmampuan sosial-

					ekonomi masyarakat agar kebutuhan dasarnya terpenuhi
				2	Pengembangan kemampuan PMKS dalam melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
	4	Menurunnya Pengangguran	1	Peningkatan daya saing ketenagakerjaan	1 Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja
				2	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat bersaing pada pasar bebas tenaga kerja yang diberlakukan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan sesuai dengan Mutual Recognition Arrangement (MRA)
	5	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	1	Penguatan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana, serta pembangunan keluarga	1 mengendalikan jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk
			2	Pembangunan dan Perlindungan Anak	1 Pengintegrasian kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam kebijakan pembangunan
	6	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	1	Peningkatan karakter (character building), peran pemuda dan prestasi olahraga	1 Pengembangan pengetahuan dan kemampuan teknis serta perluasan kesempatan bagi pemuda dan organisasi pemuda dalam berbagai aktivitas pembangunan (ekonomi, sosial, politik, budaya)
	7	Meningkatnya Prestasi Olahraga			2 Peningkatan tata kelola olahraga
3	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan	1 Menurunnya angka kemiskinan	1	Pengembangan kelembagaan ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat pedesaan	1 Berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat pedesaan untuk penanggulangan kemiskinan, dan kesenjangan antar wilayah
		2 Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan			

berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	3	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas	1	Peningkatan kinerja Koperasi dan UMKM	1	Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM sebagai kelembagaan ekonomi kerakyatan
					2	Meningkatkan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi
	4	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan perkapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi	1	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	1	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
					5	Meningkatnya peran sektor industri terhadap PDRB
	2	Menumbuhkembangkan sentra industri kecil dan menengah				
	3	Pemetaan potensi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara langsung	1	Memanfaatkan potensi energi baru dan terbarukan secara langsung untuk penyediaan energi yang dapat mendukung sektor industri, pariwisata dan sektor lainnya		
	6	Peningkatan kontribusi investasi/ penanaman modal dalam perekonomian daerah	1	Peningkatan Tata Kelola Barang & Jasa	1	Meningkatkan Pembangunan, Pemberdayaan, dan kualitas pengelolaan pasar rakyat
					2	Meningkatkan Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen
	7	Meningkatnya peran pariwisata daerah	1	Peningkatan daya saing pariwisata	1	Mengoptimalkan promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri
					2	Mengembangkan ekonomi kreatif untuk mendukung sektor pariwisata
					3	Mengotimalkan pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata

					4	Meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	
		8	Stabilitas pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB	1	Revitalisasi sektor pertanian dan perikanan	1	Meningkatnya produksi pertanian tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan berbasis sumberdaya lokal dan pemanfaatan teknologi
						2	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian dan perikanan berbasis mutu produk, pasca panen pengolahan dan pemasaran
						3	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya
4	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang nyaman, beradab dan bermartabat berlandaskan nilai agama dan budaya	1	Terwujudnya kondisi sosial masyarakat yang baik berdasar nilai agama dan budaya	1	Optimalisasi penanganan gangguan keamanan, ketertiban, dan bencana	1	Peningkatan dukungan pemerintah dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban umum
						2	Peningkatan sikap dan perilaku saling percaya, saling menghormati dan saling toleran antar dan antar kelompok masyarakat
						3	Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana
				2	Internalisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai agama dan budaya	1	Peningkatan kualitas kehidupan beragama di semua lapisan masyarakat
						2	Mewujudkan karakter masyarakat yang berbudaya dan berperadaban luhur
				3	Pengembangan infrastruktur dan suprastruktur politik	1	Peningkatan pemahaman politik dan wawasan kebangsaan masyarakat, serta penguatan lembaga politik masyarakat
		2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	4	Pembangunan Berkesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	Pengintegrasian kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan

						dalam kebijakan pembangunan	
5	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan profesional	1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	1	Penguatan penyelenggaraan manajemen ASN yang profesional	1	Peningkatan kapasitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai kualifikasi, kompetensi dan berorientasi pada kinerja yang tinggi
				2	Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa	1	Pemantapan kelembagaan, pengelolaan keuangan, dan administrasi pemerintahan desa
				3	Optimalisasi pendayagunaan peraturan perundang-undangan dan tata peraturan daerah	1	Pendayagunaan peraturan perundang-undangan secara lebih maksimal dan tata peraturan daerah lebih efektif
		2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	1	Peningkatan kualitas perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah	1	Peningkatan konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
				2	Peningkatan ketersediaan dan kualitas data statistik dan informasi pembangunan serta persandian daerah	1	Peningkatan kualitas data statistik dan informasi pembangunan serta persandian daerah baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasi dan kemutakhirannya untuk perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan
				3	Peningkatan kualitas tatakelola keuangan dan aset daerah	1	Pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

		3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Meningkatkan pemanfaatan potensi pendapatan asli daerah	1	Meningkatkan pendapatan asli daerah
				2	Penguatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	1	Penyempurnaan dan pengefektifan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintah
				3	Perkuatan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah	1	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah
				4	Perkuatan penyelenggaraan pemerintahan umum	1	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum
				5	Peningkatan pelayanan perizinan	1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

5. Program Strategis

Dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Selatan serta berdasarkan Kebijakan yang telah dirumuskan, maka disusun program Stratejik untuk periode waktu tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA			BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH			
					SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
Misi Kesatu: Membangun Infrastruktur Untuk Mempercepat Kemajuan Desa Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah												
1	Meningkatnya Jalan, Jembatan dan Irigasi	1	Pemantapan sistem dan jaringan transportasi wilayah	1	Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung perkembangan dan investasi pada kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi	Program Penyelenggaraan Jalan	Konstruksi jalan Kabupaten dengan permukaan berpenutup aspal (hotmix) / beton semen pada jaringan jalan kabupaten	Persen	29.00	100.00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	1	Pemantapan sistem dan jaringan transportasi wilayah	2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi yang seimbang antara penyediaan prasarana dan sarana, efektifitas pelayanan, terutama ketertiban, keselamatan dan keandalan serta kenyamanan, dampak lingkungan, dan keterjangkauan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Angka kecelakaan transportasi	Kejadian / Tahun	215	100	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai yang baik	Persen	60.00	100.00	Perhubungan	Dinas Perhubungan		
				Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Sosialisasi dan pengawasan transportasi perkeretaapian	Kegiatan	1	1	Perhubungan	Dinas Perhubungan		

				dan pemerataan pelayanan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Sosialisasi dan pengawasan transportasi udara	Kegiatan	1	1	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		2	Perluasan layanan telekomunikasi dan informasi	Peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh pusat pelayanan dan wilayah pelayanannya	Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Cakupan/jangkauan akses layanan telekomunikasi dan internet	Persen	25.00	100.00	Komunikasi dan informatika	Seluruh Perangkat Daerah
1	Kondisi lingkungan pemukiman yang layak dan sehat	1	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan dan pemanfaatan kawasan permukiman	1	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas, layak, dan sehat melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Persen	31.48	100.00	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan dan Permukiman; Dinas Lingkungan Hidup; Sekretariat Daerah
		2	Penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas lima tahunan RTRW	1	Pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan seluruh	Program Penataan Ruang Wilayah	Persen	15.00	100.00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu 1 Pintu; Dinas Lingkungan Hidup; Sekretariat Daerah

				pemangku kepentingan (stakeholder)								
	3	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan keaneka ragaman hayati	1	Meningkatkan perbaikan fungsi lingkungan dalam upaya mengendalikan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup pada air, hutan dan lahan, udara dan keanekaragam hayati	Program Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	100.00	100.00	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kasus bidang kehutanan	Persen	100.00	100.00	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
					Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Persen	100.00	100.00	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
					Program Pengembangan dan Pengelolaan sumber daya air	Persentase progres daerah irigasi dan jaringannya yang dibangun/dipelihara, direhabilitasi dan dikembangkan	Persen	20.00	100.00	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup; PUPR	
Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Baik, Terjangkau dan Proaktif												
1	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Penguatan pelayanan dan daya saing pendidikan	1	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan bermutu	Program Pendidikan Dasar	APM SMP / MTS	Persen	78.36	85.00	Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Program Pendidikan Anak	APK PAUD	Persen	49.08	80.00	Pendidikan	Dinas Pendidikan

	masyarakat				Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat							
					Program Fasilitasi Pendidikan	Persentase siswa tidak mampu yang mendapatkan beasiswa / bantuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah	Persen	0.00	100.00	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
					Program Pengembangan Perpustakaan Daerah	Angka harapan lama sekolah	Persen	92.00	95.00	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	
2	Meningkatnya kualitas Derajat kesehatan masyarakat	1	Penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat	1	Peningkatan upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan	Program Bina Gizi & Kesehatan Ibu & Anak	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Persen	96.90	100.00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Program Pengembangan Layanan RSUD dr.H.BOB BAZAR,SKM	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	83.70	100.00	Kesehatan	Dinas Kesehatan & RSUD dr.H.BOB BAZAR,SKM
						Program Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan	Peningkatan angka temuan kasus TB semua tipe yang dilaporkan (CNR)	Persen	49.30	80.00	Kesehatan	Dinas Kesehatan; Sekretariat Daerah
						Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Cakupan rumah tangga Sehat	Persen	50.00	60.00	Kesehatan	Dinas Kesehatan; Sekretariat Daerah
						Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan	Persentase penduduk yang memiliki kartu jaminan	Persen	44.24	60.00	Kesehatan	Dinas Kesehatan

					Kesehatan Nasional	pemeliharaan kesehatan pra bayar					
					Program Kefarmasian & Alat Kesehatan	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kfarmasian sesuai standar kualitas yang baik	Persen	60.00	85.00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program Pengembangan & Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase puskesmas yang memiliki Dokter jaga	Persen	70.00	100.00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana Kesehatan	Cakupan puskesmas dan jaringannya yang memiliki alat kesehatan sesuai standar	Persen	80.00	100.00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1	Pembangunan sumber daya manusia dan pembentukan modal sosial dan masyarakat desa	1	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana serta sosial dasar kemasyarakatan lainnya	Program Pengerahan & Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi	Persen	50.00	65.00	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

		2	Perluasan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial secara komprehensif	1	Penjaminan penanganan risiko guncangan dan kerentanan sosial serta ketidakmampuan sosial-ekonomi masyarakat agar kebutuhan dasarnya terpenuhi	Program Perlindungan & Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	20.00	45.00	Sosial	Dinas Sosial
				2	Pengembangan kemampuan PMKS dalam melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh penyuluhan / bimbingan / konseling / informasi kesejahteraan sosial	Persen	12.60	50.00	Sosial	Dinas Sosial; Sekretariat Daerah
4	Menurunnya Pengangguran	1	Peningkatan daya saing ketenagakerjaan	1	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja	Program Pengembangan Hubungan Industrial & Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase rumah tangga yang memiliki jaminan ketenagakerjaan	Persen	3.37	10.00	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Sekretariat Daerah
				2	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat bersaing pada pasar bebas tenaga kerja yang diberlakukan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan sesuai dengan Mutual	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	6.00	3.00	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase lembaga pelatihan tenaga kerja swasta yang mendapatkan pembinaan	Persen	40.00	100.00	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

				Recognition Arrangement (MRA)								
5	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	1	Penguatan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana, serta pembangunan keluarga	1	mengendalikan jumlah kelahiran, penambahan, dan laju pertumbuhan penduduk	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	Persentase laju pertumbuhan penduduk	Persen	1.22	0.95	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Kecamatan
						Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan KTP elektronik	Persen	63.00	90.00	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	Pembangunan dan Perlindungan Anak	1	Pengintegrasian kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam kebijakan pembangunan	Program Perlindungan Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	46.00	85.00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang	Persen	2.00	10.00	Sosial	Dinas Sosial

						berhasil di rehabilitasi baik di dalam maupun luar panti						
6	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	1	Peningkatan karakter (character building), peran pemuda dan prestasi olahraga	1	Pengembangan pengetahuan dan kemampuan teknis serta perluasan kesempatan bagi pemuda dan organisasi pemuda dalam berbagai aktivitas pembangunan (ekonomi, sosial, politik, budaya)	Program Peningkatan Kapasitas & Peran Pemuda	Fasilitasi pengelola kader pemuda yang dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program	Kader	60	300	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
7	Meningkatnya Prestasi Olahraga			2	Peningkatan tata kelola olahraga	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Persentase keikutsertaan olahragawan pada even olahraga skala regional, nasional, maupun internasional	Persen	90.00	99.00	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; Kecamatan
Misi Ketiga : Membangun perekonomian daerah dengan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan perdesaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan												
1	Menurunya angka kemiskinan	1	Pengembangan kelembagaan ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat perdesaan	1	Berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat perdesaan untuk penanggulangan kemiskinan, dan kesenjangan antar wilayah	Program Bina Pembangunan Desa	Desa yang memiliki warung desa yang menghasilkan	Angka	0	260	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan
2	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan											

3	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas	1	Peningkatan kinerja Koperasi dan UMKM	1	Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM sebagai kelembagaan ekonomi kerakyatan	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Peningkatan Persentase UMKM	Persen	4.00	6.00	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				2	Meningkatkan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan koperasi aktif	Persen	50.00	100.00	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan perkapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi	1	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	1	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Peningkatan skor PPH ketersediaan	Angka	79.9	83.5	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Sekretariat Daerah
5	Meningkatnya peran sektor industri terhadap PDRB	1	Akselerasi pertumbuhan sektor industri, baik industri besar, menengah maupun kecil	1	Menumbuhkembangkan kawasan industri yang dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah komoditi unggulan	Program penumbuhan dan pengembangan perwilayahan persebaran industri	Peningkatan jumlah kawasan pengembangan industri	Kawasan	1	2	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ; Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				2	Menumbuhkembangkan sentra industri kecil dan menengah	Program Penumbuh & Pengembangan Industri Kecil & Menengah	Peningkatan jumlah kawasan sentra IKM	Kawasan	0	1	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ; Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3	Pemetaan potensi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara langsung	1	Memfaatkan potensi energi baru dan terbarukan secara langsung untuk penyediaan energi yang dapat	Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	Peningkatan pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan secara langsung	Persen	40.00	100.00	Energi dan SDM	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

					mendukung sektor industri, pariwisata dan sektor lainnya							
6	Peningkatan kontribusi investasi/ penanaman modal dalam perekonomian daerah	1	Peningkatan Tata Kelola Barang & Jasa	1	Meningkatkan Pembangunan, Pemberdayaan, dan kualitas pengelolaan pasar rakyat	Program Pengembangan Pasar Rakyat	Persentase pasar rakyat yang mendapat fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat	Persen	0.00	100.00	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						Program Pengembangan Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	17	20	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				2	Meningkatkan Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	Persentase kegiatan pengawasan barang dan jasa beredar yang dilaksanakan	Persen	80.00	100.00	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Sekretariat Daerah
		2	Peningkatan daya saing dan optimalisasi penanaman modal	1	Mengoptimalkan promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi PMDN & PMA	Persen	10.00	10.00	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Meningkatnya peran pariwisata daerah	1	Peningkatan daya saing pariwisata	1	Meningkatkan upaya pengembangan destinasi wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan jumlah objek wisata	Objek	19	43	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				2	Mengembangkan ekonomi kreatif untuk mendukung sektor pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rata-rata pertumbuhan produk kreatif berbasis seni dan	Persen	0.00	20.00	Pariwisata	Seluruh Perangkat Daerah

						budaya per tahun						
				3	Mengotimalkan pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan jumlah wisatawan nusantara	Persen	5.00	5.00	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				4	Meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan ekonomi Kreatif	Persentase SDM aparatur pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten	Persen	50.00	100.00	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8	Stabilitas pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB	1	Revitalisasi sektor pertanian dan perikanan	1	Meningkatnya produksi pertanian tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan berbasis sumberdaya lokal dan pemanfaatan teknologi	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (padi)	Ton/Ha/ Tahun	5.2	5.7	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
						Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura	Peningkatan Produktivitas Cabe Besar	Ku/Ha/ Tahun	151.62	150	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
						Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan	Peningkatan populasi sapi potong	Ton	35.104	41.349	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
						Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat	Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian	Ekor	111.195	122.708	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan	Peningkatan adopsi inovasi teknologi bidang pertanian	Persen	30.00	70.00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program penerapan teknologi dan inovasi pertanian berkelanjutan	Persentase Poktan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	50.00	80.00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	Peningkatan nilai tambah produk pertanian	Persen	20.00	80.00	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian dan perikanan berbasis mutu produk, pasca panen pengolahan dan pemasaran	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Peningkatan nilai tambah produk pertanian	Persen	30.00	30.00	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Perikanan	Peningkatan nilai tambah produk perikanan	Persen	20.00	20.00	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		3	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Program Pengelolaan TPI dan Pemberdayaan	Volume produksi ikan tangkap (ton)	Ton	27,295.6 0	36578.71 / 33.870,3 9	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan

					Nelayan							
					Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya	Produksi ikan budidaya	Ton	25,691.40	45513.88/34.988,24	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	
Misi Keempat : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, menjunjung tinggi hukum, demokratis dan memberdayakan perempuan berlandaskan nilai agama dan budaya												
1	Terwujudnya kondisi sosial masyarakat yang baik berdasar nilai agama dan budaya	1	Optimalisasi penanganan gangguan keamanan, ketertiban, dan bencana	1	Peningkatan dukungan pemerintah dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban umum	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi	Persen	88.00	100.00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan Sekretariat Daerah
				2	Peningkatan sikap dan perilaku saling percaya, saling menghormati dan saling toleran inter dan antar kelompok masyarakat	Program Kerukunan Umat Beragama	Persentase kegiatan koordinasi kerukunan umat beragama yang dilaksanakan	Persen	88.00	100.00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Sekretariat Daerah
				3	Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Fasilitasi pemulihan sarana dan prasarana publik dan rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah Warga Pasca Bencana	Persen	65.00	75.00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persen	100.00	100.00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

	2	Internalisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai agama dan budaya	1	Peningkatan kualitas kehidupan beragama di semua lapisan masyarakat	Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat	Persentase kegiatan koordinasi dan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	89.78	99.00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Sekretariat Daerah; Kecamatan
			2	Mewujudkan karakter masyarakat yang berbudaya dan berperadaban luhur	Program Pelestarian Budaya	Even sejarah, budaya, dan kesenian daerah yang terlaksana	Even	5	5	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Kecamatan
	3	Pengembangan infrastruktur dan suprastruktur politik	1	Peningkatan pemahaman politik dan wawasan kebangsaan masyarakat, serta penguatan lembaga politik masyarakat	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Persen	66.00	75.00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase peningkatan peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persen	60.00	80.00	Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
					Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Wawasan kebangsaan dalam masyarakat	Persen	58.00	70.00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Sekretariat Daerah
					Program Dukungan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang pengurus/anggotanya mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas	Persen	-	70.00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	4	Pembangunan Berkesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	Pengintegrasian kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan dalam kebijakan pembangunan	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88.82	90.72	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Sekretariat Daerah; Kecamatan
---	--------------------------------	---	---	---	---	--	---------------------------------	--------	-------	-------	--	---

Misi Kelima : Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan profesional

1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	1	Penguatan penyelenggaraan manajemen ASN yang profesional	1	Peningkatan kapasitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai kualifikasi, kompetensi dan berorientasi pada kinerja yang tinggi	Program Penguatan KORPS Pegawai Republik Indonesia	Persentase ASN yang mendapat fasilitas Penyelesaian Kasus Hukum Dan Kepegawaian	Persen	-	95.00	KORPRI	Sekretariat KORPRI
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tersedianya pakaian dinas, pakaian kerja lapangan, pakaian KORPRI dan pakaian khusus hari tertentu	Persen	80.00	90.00	Penunjang (Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan)	Seluruh Perangkat Daerah
						Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah	Persentase kegiatan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan yang terlaksana	Persen	65.00	90.00	Penunjang (Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan)	Badan Kepegawaian dan Diklat
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur	Persen	100.00	100.00	Penunjang (Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan)	Seluruh Perangkat Daerah

		2	Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa	1	Pemantapan kelembagaan, pengelolaan keuangan, dan administrasi pemerintahan desa	Program Pemerintahan Desa	Persentase desa dan kelurahan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa	Persen	75.00	100.00	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sekretariat Daerah
		3	Optimalisasi pendayagunaan peraturan perundang-undangan dan tata peraturan daerah	1	Pendayagunaan peraturan perundang-undangan secara lebih maksimal dan tata peraturan daerah lebih efektif	Program Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase Perda bermasalah yang dibatalkan	Persen	100.00	100.00	Membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, kordinasi dan pelayanan administratif	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Sekretariat Daerah
						Program Penegakan Perda	Tingkat penurunan pelanggaran Perda/tahun	Persen	70.00	100.00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan Sekretariat Daerah
						Program Peningkatan Kualitas Personil Sat Pol PP	Persentase Personil Sat Pol PP yang mendapatkan peningkatan kualitas dalam penegakan tata aturan daerah	Persen	50.00	100.00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	1	Peningkatan kualitas perencanaan dan penelitian pengembangan pembangunan daerah	1	Peningkatan konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antar ruang,	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD	Persen	70.00	100.00	Penunjang (Perencanaan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Penelitian dan Pengembangan; Kecamatan
						Program Penelitian,	Kegiatan peningkatan dan	Kegiatan	-	23	Penunjang (Penelitian	Badan Penelitian dan Pengembangan

			antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	pengembangan dan inovasi daerah	pengembangan inovasi daerah				dan Pengembangan	
				Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Monitoring, pemantauan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Paket	-	6	Penunjang (Perencanaan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Dokumen LAKIP, Renja, LKPJ, Dokumen Laporan Tahunan	Dokumen	4	4	Penunjang (Perencanaan)	Seluruh Perangkat Daerah
				Program Pengelolaan Administrasi Tanah, Izin Lokasi, serta Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah	Persentase izin penggunaan tanah yang dikeluarkan dengan memperhatikan RTRW dan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten	Persen	-	100.00	Pertanahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Peningkatan ketersediaan dan kualitas data statistik dan informasi pembangunan serta persandian daerah	1	Peningkatan kualitas data statistik dan informasi pembangunan serta persandian daerah baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasi dan kemutakhirannya untuk perencanaan,	Program Pengembangan Data, Informasi Statistik, dan Persandian Daerah	Kebutuhan data statistik dan informasi pembangunan daerah	Persen	80.00	100.00	Statistik	Seluruh Perangkat Daerah

				penganggaran, dan evaluasi pembangunan								
		3	Peningkatan kualitas tatakelola keuangan dan aset daerah	1	Pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD		WDP	WTP	Penunjang (Keuangan)	Sekretariat Daerah; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Meningkatkan pemanfaatan potensi pendapatan asli daerah	1	Meningkatkan pendapatan asli daerah	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase aset tanah Kabupaten Lampung Selatan yang tersertifikasi	Persen	5.00	5.00	Penunjang (Keuangan)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		2	Penguatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	1	Penyempurnaan dan pengaktifan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintah	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dan Pemerintahan	Skor capaian penyelenggaraan SPIP	Skor	1	4	Pendukung Pembinaan dan Pengawasan	Inspektorat
		3	Perkuatan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah	1	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan	Kegiatan	4	5	Membantu kepala daerah dalam penyusunan	Sekretariat Daerah

			desentralisasi dan otonomi daerah		perangkat daerah kabupaten				kebijakan, kordinasi dan pelayanan administratif	
				Program Penataan Administrasi Wilayah	Rapat-rapat dan sosialisasi terkait penataan/pemekaran daerah	Kegiatan	-	30	Membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, kordinasi dan pelayanan administratif	Dinas Perumahan dan Permukiman; Sekretariat Daerah
4	Perkuatan penyelenggaraan pemerintahan umum	1	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD	Persentase terlaksananya kegiatan keprotokolan	Persen	80.00	98.00	Membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, kordinasi dan pelayanan administratif	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar kualitas yang baik	Persen	85.00	90.00	Penunjang (Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan)	Seluruh Perangkat Daerah
				Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan	Kegiatan pelatihan penataan dan peningkatan administrasi pembangunan	Kegiatan	-	5	Membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, kordinasi dan pelayanan administratif	Sekretariat Daerah
				Program Pelayanan	Persentase dokumen	Persen	91.00	95.00	Penunjang (Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah

					Adminstrasi Perkantoran	administrasi perkantoran yang diselesaikan tepat waktu				n serta Pendidikan dan Pelatihan)		
					Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah	Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan/ dipelihara	Persen	65.00	95.00	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
					Program Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Kerjasama Pembangunan	Persentase kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan kepada desa	Persen	86.00	98.00	Membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, kordinasi dan pelayanan administratif	Sekretariat Daerah	
					Program Penguatan Peran Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja pelayanan Kecamatan	Indeks	80	85	Kordinasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	
		5	Peningkatan pelayanan perizinan	2	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja pelayanan perizinan	Persen	0.00	100.00	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Setdakab

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2018 sebanyak 40 (empat puluh) item sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021. Adapun target dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Perda Nomor 01 Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021

MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Membangun infrastruktur untuk mempercepat kemajuan desa sesuai dengan tata ruang wilayah	1	Meningkatnya ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat	1	Persentase akses jalan, jembatan dan irigasi dalam kondisi mantap bagi masyarakat	1	Meningkatnya Jalan, Jembatan dan Irigasi	1	Persentase konstruksi Jalan Kabupaten dengan permukaan berpenutup aspal (hotmix)/beton semen pada Jaringan Jalan Kabupaten (persen)	43,88	52,6	76,3	100	100	100
								2	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (persen)	39	43	55	75	90	100
								3	Panjang Jalan Desa/Lingkungan dengan kondisi mantap (persen)	21,82	29,46	37,09	44,73	52,36	60
								4	Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dengan kondisi mantap (persen)	64,06	70	85	100	100	100
						2	Meningkatnya aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah	1	Persentase desa yang terhubung dengan pusat kecamatan	20	33,33	46,67	60	73,33	100
								2	Persentase Desa yang terhubung dengan Jaringan Telekomunikasi (persen)	25	50	80	85	90	100
								3	Persentase desa yang teraliri listrik	75	80	90	95	100	100

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
		2	Kondisi lingkungan pemukiman yang layak dan sehat	1	Kondisi lingkungan pemukiman yang layak dan sehat	1	Persentase desa yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum (persen)	48,28	65,52	82,76	100	100	100		
						2	Persentase kawasan kumuh, padat dan miskin di Kabupaten Lampung Selatan (persen)	100	95	85	75	50	15		
						3	Persentase Desa dengan Akses Sanitasi yang Layak	50	65	75	100	100	100		
						4	Presentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti terkait pencemaran & pengrusakan lingkungan (persen)	100	100	100	100	100	100		
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik, terjangkau dan proaktif	1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	1	Angka rata rata lama sekolah (angka)	7,51	8,01	8,51	9	9,5	10
							2	Angka Harapan Lama Sekolah (angka)	11,32	11,65	11,99	12,33	12,66	13	
						2	Meningkatnya kualitas Derajat kesehatan masyarakat	1	Usia harapan hidup (tahun)	68,43	68,75	69,06	69,37	69,69	70
							3	Meningkatnya Pendapatan	1	PDRB Per Kapita (dalam ribu)	32225	34820	36380	38460	40275

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
				Masyarakat											
			4	Menurunnya Pengangguran	1	Tingkat pengangguran terbuka /TPT (persen)	5,9	5,7	5,5	5	4	3			
			5	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (persen)	1,18	1,13	1,09	1,04	1	0,95			
			6	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	1	Jumlah Pemuda Pelopor (orang)	22	24	26	28	30	32			
			7	Meningkatnya Prestasi Olahraga	1	Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi (jenis)	16	18	20	22	24	28			
3	Membangun perekonomian daerah dengan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan perdesaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	1	Rata - rata Laju pertumbuhan ekonomi	1	Menurunnya angka kemiskinan	1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (persen)	84,42	85,94	87,45	88,97	90,48	92
								2	Indeks koefisien GINI (indeks)	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,2
						2	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas	1	Pertumbuhan ekonomi (persen)	6,17	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
								2	PDRB ADHB (milyar rupiah)	31.500	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
								3	Inflasi Kota Kalianda (angka)	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
								4	Persentase PAD terhadap penerimaan daerah (persen)	7,48	10	10,55	11,12	11,88	12,75
						3	Terpenuhinya kebutuhan	1	Pola pangan harapan konsumsi (angka)	79,5	80	80,5	81	81,5	82

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021
			konsumsi pangan perkapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energy	2	Pola pangan harapan ketrediaan (angka)	81	81,5	82	82,5	83	83,5
			4 Meningkatkan peran sektor industri terhadap PDRB	1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (persen)	26,07	28,26	30,44	32,63	34,81	37
			5 Peningkatan kontribusi investasi/ penanaman modal dalam perekonomian daerah	1	Persentase peningkatan investasi PMDN (persen)	10	10	10	10	10	10
				2	Persentase peningkatan investasi PMA (persen)	5	5	5	5	5	5
			6 Meningkatkan peran pariwisata daerah	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen)	1,46	1,52	1,58	1,64	1,7	1,76
			7 Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan	1	Indeks desa membangun (2015=0,612)	0,62	0,63	0,64	0,66	0,67	0,68
				2	Jumlah warung desa yang menghasilkan laba	-	34	84	150	200	260
			8 Stabilitas pertumbuhan sektor pertanian	1	Persentase sektor pertanian terhadap PDRB (persen)	31,1	31	30,85	30,6	30,25	30

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, menjunjung tinggi hukum, demokratis dan memberdayakan perempuan berlandaskan nilai agama dan budaya	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, menjunjung tinggi hukum, demokratis dan memberdayakan perempuan berlandaskan nilai agama dan budaya	1	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	1	terhadap PDRB	2	Nilai tukar petani	107	110	113	116	118	120
					2	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (persen)	100	100	100	100	100	100	
		2	IPG	2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,82	88,96	89,25	89,50	89,8	90,72
						2	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan demikian dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Dengan adanya dokumen Perjanjian Kinerja ini setiap pimpinan instansi pemerintah dapat memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menilai keberhasilan organisasi. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyusun dokumen perjanjian kinerja. Dokumen perjanjian kinerja yang disusun merupakan kompilasi perjanjian kinerja dari masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Dokumen perjanjian kinerja dimaksud memuat secara umum memuat sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 oleh masing-masing unit satuan kerja beserta indikator kerjanya berupa *output* dan *outcome*.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat diilustrasikan per misi. (Dokumen Terlampir).

C. DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mendukung pencapaian program prioritas nasional melalui penganggaran pada APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

No	Program Strategis	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Jalan (PU)	379.571.053.481,00
2	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat (Dishub)	834.732.500,00
3	Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (Sekda), (PU), (Bappeda)	199.000.000,00 453.250.000,00 30.000.000,00
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (Sekda), (PU), (Disperkim)	30.000.000,00 32.908.035.320,00 20.344.061.270,00
5	Program Penataan Ruang Wilayah (PU)	1.897.728.000,00
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (DLH)	971.707.000,00
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (DLH)	60.000.000,00
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (DLH)	197.520.000,00
9	Program Pengembangan & Pengelolaan Sumber Daya Air (PU PR)	13.036.059.950,00
10	Program Pendidikan Dasar (Disdik)	140.919.799.732,00
11	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Disdik)	587.612.900,00
12	Program Fasilitasi Pendidikan (Disdik)	2.484.667.900,00
13	Program Pengembangan Perpustakaan Daerah (Perpus)	290.500.000,00
14	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Dinkes)	3.365.737.000,00
15	Program Pengembangan Layanan RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM (RSUD)	6.477.236.750,00
16	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Dinkes), (Sekda)	5.342.274.487,00 366.260.000,00
17	Program Pembinaan Upaya Kesehatan (Dinkes)	25.187.484.936,00
18	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Dinkes)	71.352.324.023,00

No	Program Strategis	Anggaran
19	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dinkes)	5.773.642.515,00
20	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinkes)	331.980.000,00
21	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Kesehatan (Dinkes)	6.323.633.200,00
22	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinsos)	1.382.522.000,00
23	Program Pemberdayaan Sosial (Dinsos)	86.701.000,00
24	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Disnaker)	439.352.476,00
25	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Disnaker)	95.140.000,00
26	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (Disnaker)	15.000.000,00
27	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (PP & KB)	7.001.803.500,00
28	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	3.073.531.600,00
29	Program Perlindungan Anak (Sekda), (PP & PA)	30.000.000,00 34.500.000,00
30	Program Rehabilitasi Sosial (Dinsos)	313.127.000,00
31	Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemuda (Dispora)	245.713.000,00
32	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga (Dispora)	888.390.000,00
33	Program Bina Pembangunan Desa (DPMD)	1.433.725.600,00
34	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi (Disdag)	196.473.350,00
35	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi (Dinas Koperasi)	59.750.000,00
36	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Sekda) (DKP)	285.000.000,00 739.690.000,00
37	Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri (Disdag)	120.000.000,00
38	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (Disdag)	2.338.039.000,00
39	Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Disdag)	100.000.000,00

No	Program Strategis	Anggaran
40	Program Pengembangan perdagangan (Disdag)	392.471.950,00
41	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen (Disdag)	100.000.000,00
42	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (DPMPTSP)	190.000.000,00
43	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan (DPMPTSP)	545.000.000,00 105.000.000,00
44	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Disperbud)	3.754.927.350,00
45	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (Sekda), (Disdag)	365.000.000,00 1.051.362.500,00
46	Program Pemasaran Pariwisata (Disparbud)	272.380.000,00
47	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparbud)	127.000.000,00
48	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan (TPH Bund)	145.000.000,00
49	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura (TPH Bund)	64.921.000,00
50	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan (TPH Bund)	279.060.200,00
51	Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat (Disnak Keswan)	769.805.000,00
52	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan (TPH Bund), (Disnak)	5.927.401.138,00 1.584.738.500,00
53	Program penerapan teknologi dan inovasi pertanian berkelanjutan (TPH Bund), (Disnak Keswan)	100.000.000,00 190.475.000,00
54	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian (TPH Bund), (Disnak Keswan)	149.925.400,00 23.543.000,00
55	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian (TPH Bund), (DKP), (Disnak Keswan)	185.909.800,00 61.000.000,00 276.742.000,00
56	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Perikanan (Perikanan)	175.000.000,00
57	Program Pengelolaan TPI dan Pemberdayaan Nelayan (Perikanan)	1.200.534.200,00
58	Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya (Perikanan)	1.123.415.450,00
59	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sekda), (Pol Pp)	62.793.200,00 3.907.218.500,00

No	Program Strategis	Anggaran
60	Program Penanggulangan Bencana Daerah	247.750.000
61	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	241.000.000,00
62	Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat (Sekda)	7.056.200.000,00
63	Program Pelestarian Budaya (Disparbud)	2.125.975.000,00
64	Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	10.936.350.000,00
65	Program peningkatan wawasan kebangsaan (Sekda)	164.327.000,00
66	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Sekda)	31.413.000,00
67	Program Penguatan KORPS Pegawai Republik Indonesia	287.000.000,00
68	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Sekda), (DPRD), (Dispora)	608.560.000,00 670.000.000,00 233.835.000,00
69	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah (BKD)	2.224.711.500,00
70	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Sekda), (BPKAD), (PU), (Disdag), (PP & RD), (Perpus), (Capil), (DPRD)	52.500.000,00 35.000.000,00 270.000.000,00 9.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 585.000.000,00
71	Program Pemerintahan Desa (Sekda), (DPMD)	337.500.000,00 436.967.500,00
72	Program Penataan Produk Hukum Daerah (Sekda), (DPRD), (POL PP)	961.854.221,00 982.402.000,00 534.544.000,00
73	Program Penegakan Perda (Pol Pp)	171.000.000,00
74	Program Peningkatan Kualitas Personil Sat Pol PP	36,000,000
75	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Litbang), (Bappeda)	76.000.000,00 2.051.749.000,00
76	Program Penelitian, pengembangan dan inovasi daerah (Litbang)	223.000.000,00
77	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Bappeda)	435.000.000,00
78	Program Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan (TPH Bund)	20.000.000,00
79	Program Pengelolaan Administrasi Tanah, Izin Lokasi, serta Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah (Disperkim)	294.949.000,00

No	Program Strategis	Anggaran
80	Program Pengembangan Data, Informasi Statistik, dan Persandian Daerah (TPH Bund), (DKP), (Disdik), (Disnaker), (Diskoper), (PU), (Bappeda)	46.130.000,00 57.540.000,00 24.421.000,00 29.900.000,00 27.587.200,00 180.000.000,00 198.000.000,00
81	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekda), (Bappeda), (BPKAD), (PP RD)	148.442.750,00 3.041.220.950,00 3.107.637.600,00 3.041.220.950,00
82	Program Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD)	618.250.000,00
83	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Sekda)	766.386.200,00
84	Program Penataan Administrasi Wilayah (Sekda)	204.972.800,00
85	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD (Sekda), (DPRD)	6.433.734.100,00 228.000.000,00
86	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Sekda)	16.410.411.625,00
87	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan (Sekda)	806.360.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

INSPEKTORAT

Jl. Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan 35513

Telp. 0727 - 322 221

PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Selatan menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kalianda, 27 Maret 2019





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

INSPEKTORAT

Jl. Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan 35513

Telp. 0727 - 322 221

CHECKLIST REVIU

No.	Pernyataan		Check List
1.	Format	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
2.	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none">1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya,	✓
3.	Substansi	<p>1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja.</p> <p>2. Tujuan/sasaram dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.</p> <p>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.</p> <p>4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.</p> <p>5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.</p> <p>6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.</p> <p>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.</p> <p>8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.</p> <p>9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai.</p> <p>10. IKU dan IKA telah SMART.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>



Y. JOKO SAPTA PRIHANDAYA
 Pembina, Tingkat I
 NIP. 19661229 199903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

INSPEKTORAT

Jl. Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan 35513

Telp. 0727 - 322 221

LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2018

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan reviu atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 dalam rangka membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan, penyajian materi dalam dokumen rancangan akhir dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

II. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dilaksanakannya reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ((LKjIP) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian terbatas terhadap materi yang ada pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 dan Laporan Kinerja OPD sebagai dukungan untuk meyakinkan kesesuaian penyajian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

V. METODOLOGI REVIU

1. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta wawancara petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018.
2. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 700/140/III.01/2019 tanggal 25 Maret 2018, dengan susunan tim sebagai berikut :
 - 1). Y. JOKO SAPTA PRIHANDAYA
 - 2). Hi. ANTON CARMANA, SE
 - 3). FEBRI HERMANETY. H, SE
 - 4). KRISTANTI, S. Pt
 - 5). TAUFIK RAHMAN, S. Kom
 - 6). F. EKA DAMAYATI, SP

Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 27 Maret 2018.

VI. URAIAN HASIL REVIU

1. Pada BAB I Pendahuluan:

- 1). Aspek isu strategis Kabupaten Lampung Selatan serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi belum disajikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2). Tabel dan gambar yang disajikan sebagai data pendukung masih mempergunakan data yang lama yaitu:
 - (1). Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014.
 - (2). Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Kelomok Umur Tahun 2010 dan 2014.
 - (3). Gambar 2.3. Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014.
 - (4). Tabel 2.7. PDRB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 - 2014.
 - (5). Tabel 2.8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Kabupaten Lampung Selatan menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2014.
 - (6). Tabel 2.9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2014.
 - (7). Tabel 2.10. Distribusi PDRB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010-2014 ADHB.
 - (8). Gambar 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 - 2014.
 - (9). Gambar 2.5. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014.
 - (10). Gambar 2.6. PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 - 2014.
 - (11). Gambar 2.7. Inflasi Kota Kalianda Tahun 2013 - 2015.

- (12). Tabel 2.12. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2014.
- (13). Gambar 2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014.
- (14). Tabel 2.13. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2014.
- (15). Tabel 2.14. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2014.
- (16). Tabel 2.15. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2014.
- (17). Tabel 2.16. Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2014.
- (18). Tabel 2.17. Jenis Perkerasan Permukaan Jalan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2015.
- (19). Tabel 2.18. Kondisi Jalan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2015.
- (20). Tabel 2.19. Cakupan Akses Air Minum Layak Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014.
- (21). Tabel 2.20. Jumlah Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014
- (22). Tabel 2.21. Daftar Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014.
- (23). Tabel. 2.22. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2014.
- (24). Tabel 2.23. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2014.
- (25). Tabel 2.24. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2014.

- (26). Tabel 2.25. Perbandingan Jumlah Sekolah berdasarkan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2014.
- (27). Tabel 2.27. Perbandingan Jumlah Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2014.
- (28). Gambar 2.10. Nilai *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2014.
- (29). Tabel 2.47. Jumlah Realisasi Investasi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2014.
- (30). Tabel 2.48. Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014.
- (31). Tabel 2.50. Volume Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2015.
- (32). Tabel 2.51. Data Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2011 – 2015.
- (33). Tabel 2.52. Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebuan Rakyat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2014.
- (34). Tabel 2.53. Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2015.
- (35). Tabel 2.54. Produksi Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 – 2015.
- (36). Gambar 2.16. Jumlah Wisatawan Nusantara dan Asing ke Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 – 2014.
- (37). Tabel 2.57. Kondisi Potensi Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2014.
- (38). Tabel 2.58 Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 – 2014.

2. Pada BAB II Perencanaan Kinerja, telah tersaji lengkap sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Pada BAB III Akuntabilitas Kinerja:
 - 1). Sistematika penulisan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 2). Data-data yang disajikan antara lain Capaian Kinerja, Target, Indikator Sasaran masih menggunakan data-data tahun 2017.
 - 3). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan tidak disajikan.
 - 4). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih menyajikan data LRA tahun 2017.

VII. REKOMENDASI

Terhadap hasil reviu di atas, disarankan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 penyajian disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Menyajikan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.
2. Data Pendukung berupa tabel dan gambar sebanyak 38 item, agar disajikan menggunakan data tahun terkini (*updated*).
3. Menyajikan data Capaian Kinerja, Target, Indikator Sasaran tahun 2018.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi agar dibuat dan disajikan.